

LAPORAN KEGIATAN

KAJIAN DAMPAK PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN
TERHADAP KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN
DI PROVINSI LAMPUNG



FAKULTAS PERTANIAN UNILA- BADAN KETAHANAN
PANGAN PROVINSI LAMPUNG

2015

LAPORAN KEGIATAN
KAJIAN DAMPAK PROGRAM DESA MANDIRI PANGAN
TERHADAP KETAHANAN PANGAN DAN KEMISKINAN
DI PROVINSI LAMPUNG



Kordiyana K. Rangga
Otik Nawansih
Wuryaningsih Dwi Sayekti
Rabiatul Adawiyah
Manila Rangga
Abu Mansyur

FAKULTAS PERTANIAN UNILA- BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG
2015

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung

1. Bidang Ilmu : Agribisnis/Sosial Ekonomi Pertanian

2. Ketua Peneliti

a. Nama : Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S

b. Jenis Kelamin : Perempuan

c. NIP : 19590425 198403 2 001

d. Disiplin Ilmu : Sosial Ekonomi Pertanian

e. Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/IVc

f. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

g. Jabatan Struktural : Ketua Program Studi Penyuluhan Pertanian

h. Fakultas/Jurusan : Pertanian/Agribisnis

i. Alamat Kantor : Jl. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung

j. E-mail : korrangga@yahoo.com

3. Anggota Peneliti : 5 orang

4. Lokasi Penelitian : Provinsi Lampung

5. Lama Penelitian : 6 bulan

6. Dana Penelitian : Rp100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

7. Sumber Dana : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung

Bandar Lampung, 29 Oktober 2015

Ketua Peneliti,



Mengetahui:
Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S
NIP. 09610826 198702 1 001



Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas karunia Nya, sehingga terlaksananya kegiatan kajian “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung”.

Laporan ini disusun sebagai bentuk tanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan Desa Mandiri Pangan berdampak bagi masyarakat pelaksana kegiatan serta masyarakat sekitarnya dalam upaya pengentasan rawan pangan dan kemiskinan. Kajian ini dilakukan di 16 Desa Mandiri Pangan dengan status “Mandiri dan Pasca Kemandirian” yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kuesioner dan pedoman dalam pengolahan data menggunakan acuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Laporan ini meyajikan dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan dan tingkat ketahanan pangan serta pengembangan potensi wilayah untuk mendukung swasembada pangan di daerah penelitian. Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga kegiatan kajian ini dapat terlaksana.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2015

Dekan Fakultas Pertanian
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M. S
NIP 19610826 198702 1 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah S.W.T atas terlaksananya kegiatan kajian “Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung”. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Fakultas Pertanian Unila dan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang telah mempercayakan tugas tersebut kepada kami. Kepada petugas terkait di tingkat kabupaten serta aparat dan masyarakat desa contoh kami berterimakasih dan menghargai dukungan dan kerjasamanya, sehingga kami dapat melaksanakan penelitian hingga data yang kami perlukan dapat terkumpul tanpa kendala yang berarti.

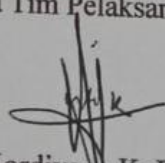
Laporan ini dibuat berdasarkan data yang diambil tim peneliti di 16 Desa Mandiri Pangan dengan status “mandiri dan pasca kemandirian” yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kuesioner dan pedoman pengolahan data menggunakan acuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Tentu dengan segala keterbatasan, kami menyadari bahwa hasil kegiatan dan laporan ini masih penuh kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima koreksi maupun masukan agar lebih sempurna.

Demikian laporan ini kami buat dengan sejujurnya dan seobyektif mungkin untuk kebaikan bersama.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2015

Ketua Tim Pelaksana



Dr. Ir. Kordiyana K. Rangga, M.S
NIP 19590425 198403 2 001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke Hadirat Allah S.W.T atas terlaksananya kegiatan kajian Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Ketahanan Pangan dan Kemiskinan di Provinsi Lampung. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung yang telah mempercayakan tugas tersebut kepada kami. Kepada petugas terkait di tingkat kabupaten serta aparat dan masyarakat desa contoh kami berterimakasih dan menghargai dukungan dan kerjasamanya sehingga kami dapat melaksanakan penelitian hingga data yang kami perlukan dapat terkumpul tanpa kendala yang berarti.

Laporan ini dibuat berdasarkan data yang diambil tim di 16 Desa Mandiri Pangan dengan status “mandiri dan pasca kemandirian” yang tersebar di 12 kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Kuesioner dan pedoman pengolahan data menggunakan acuan dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian.

Semoga hasil kajian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mengambil kebijakan dalam mengurangi kerawanan pangan dan kemiskinan khususnya di Provinsi Lampung. Tentu dengan segala keterbatasan kami menyadari bahwa hasil kegiatan dan laporan ini masih penuh kelemahan dan kekurangan, untuk itu kami membuka diri untuk menerima koreksi maupun masukan agar lebih sempurna.

Demikian laporan ini kami buat dengan sejujurnya dan seobyektif mungkin untuk kebaikan bersama.

Bandar Lampung, 28 Oktober 2015

Tim Pelaksana

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan terhadap: (a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya lokal, (b) peningkatan ketersediaan dan pembentukan akses pasar serta posisi tawar rumah tangga anggota KA, (c) penguatan kelembagaan di masyarakat, (d) peningkatan daya beli dan pendapatan serta akses pangan rumah tangga, (e) penurunan angka kemiskinan, (f) penurunan kerawanan pangan, (g) peningkatan ketahanan pangan, (h) perubahan pola pikir masyarakat (*mind set*) terhadap kegiatan pemberdayaan dan pendampingan; (2) mengetahui tingkat ketahanan pangan masyarakat, dan (3) mengkaji pengembangan potensi wilayah untuk mendukung swasembada pangan.

Pemilihan kabupaten dan desa penelitian adalah dengan pertimbangan: (a) perbedaan tahun mulai Program Demapan, (b) cakupan terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan (c) proporsi jumlah desa pelaksana Program Demapan di setiap kabupaten/kota. Desa mandiri pangan di Provinsi Lampung yang menjadi obyek kajian yaitu 16 desa/kelurahan yang tersebar di 12 kabupaten/kota. Desa/kelurahan tersebut adalah : Sukorahayu dan Labuhan Maringgai di Kabupaten Lampung Timur, Kenanga Sari di Kabupaten Lampung Tengah, Way Kandis di Kota Bandar Lampung, Fajar Sari di Kabupaten Mesuji, Ringin Sari di Kabupaten Tulang Bawang, Hadi Mulyo Barat dan Rejo Mulyo di Kota Metro, Sawo Jajar di Kabupaten Lampung Utara, Rigis Jaya dan Pampangan di Kabupaten Lampung Barat, Sri Rejeki di Kabupaten Way Kanan, Sinar Bandung di Kabupaten Pesawaran, Way Ilahan dan Banyu Urip di Kabupaten Tanggamus, serta Lebung Nala di Kabupaten Lampung Selatan.

Pada setiap desa dilakukan pengambilan data terhadap 15 responden anggota Kelompok Afinitas (KA) menggunakan kuesioner A, 15 responden bukan anggota KA menggunakan kuesioner B, dan sekitar 10 responden FGD menggunakan kuesioner C. Teknik pengambilan sampel (responden) adalah dengan *accidental sampling*. Data dianalisis menggunakan program excel dan SPSS.

.Program Demapan yang telah dilakukan memiliki dampak: (a) sedikit meningkatkan usaha produktif namun keberlangsungan usaha masih harus ditingkatkan , (b) sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil meningkatkan akses dan posisi tawar rumah tangga anggota KA , (c) meningkatkan kelembagaan khususnya KA dan LKD namun masih kurang untuk TPD, (d) sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan, (e) menurunkan tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga anggota KA kategori miskin dan meningkatnya proporsi rumah tangga KA kategori kurang sejahtera dan sejahtera , (f) menurunkan kerawanan pangan pada rumah tangga anggota KA belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program, (g) meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota KA, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan pangan, (h) meningkatkan pola pikir pada beberapa aspek kehidupan masyarakat khususnya kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidikan bagi anak-anak/keluarga dan eksistensi pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendampingan dalam pelaksanaan Program Demapan.

Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota KA relatif lebih baik daripada bukan anggota KA. Perbandingan proporsi rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA berturut-turut untuk kategori tidak tahan pangan 50,4 persen dan 64,2 persen; kurang tahan pangan 27,9 persen dan 32,9, serta tahan pangan 6,7 persen dan 2,9 persen.

Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan juga pendalaman kondisi nyata di lapang maka ada beberapa saran: (a) usaha produktif anggota KA belum berkembang serta keberlanjutannya perlu ditingkatkan. Untuk itu tenaga pendamping perlu lebih intensif dalam melaksanakan pendampingan, (b).posisi tawar anggota KA belum berhasil ditingkatkan karena mereka masih memasarkan produksinya secara individu. Oleh karena itu fungsi kelompok dalam pemasaran hasil harus ditingkatkan, (c) kinerja TPD dalam pelaksanaan program belum optimal, oleh karena itu perlu upaya perbaikannya. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok dan perlunya dilakukan monitoring program dari Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota, (d).mengingat sumber air merupakan faktor kendala dalam pengembangan potensi wilayah untuk produksi pangan maka perlu dukungan teknologi penyediaan air di desa-desa rawan pangan.

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar.....	
Ringkasan Eksekutif	
Daftar isi	
Daftar Tabel.....	
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	
1.2 Tujuan Penelitian.....	
II. METODELOGI PENELITIAN.....	
2.1 Pemilihan Kabupaten dan Desa Penelitian.....	
2.2 Jenis dan Jumlah Responden	
2.3 Data dan Metode Analisis	
III. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	
3.1 Karakteristik, Penguasaan Aset, dan Partisipasi Rumahtangga Miskin	
3.1.1 Karakteristik Rumahtangga Miskin	
3.1.2 Penguasaan Aset Rumahtangga	
3.1.3 Partisipasi dalam Kegiatan KA	
3.2 Dinamika Ketahanan Pangan dan Rawan Pangan RT Miskin	
3.2.1 Dinamika Ketahanan Pangan	
3.2.2 Dinamika Ketersediaan Pangan	
3.2.3 Dinamika Distribusi Pangan	
3.2.4 Dinamika Konsumsi Pangan.....	
3.2.5 Dinamika Rawan Pangan.....	
3.3 Dinamika Kemiskinan Rumahtangga Miskin	
3.3.1 Dinamika Tingkat Kemiskinan	
3.3.2 Dinamika Konsumsi Rumah Tinggal.....	
3.3.3 Dinamika Kondisi Sosial Ekonomi.....	
3.4 Dinamika Pola Pikir dan Dampak Program Demapan.....	
3.4.1 Kinerja dan Dampak Pola Pikir (KA).....	

3.4.2	Eksistensi dan Dampak Program Demapan
3.5	Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan.....
3.6	Kinerja Program Demapan dan Kemandirian Ekonomi Desa
3.6.1	Kinerja Ketahanan Pangan dan Rawan Pangan
3.6.2	Dinamika Indikator Kemiskinan Perdesaan.....
3.6.3	Eksistensi dan Dampak Kelembagaan Demapan.....
3.6.4	Dampak Demapan Terhadap Perubahan Pola Pikir
3.6.5	Dinamika Pendampingan Program Demapan
3.6.6	Eksistensi dan Program Lintas Sektoral

IV. KESIMPULAN.....

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	halaman
1. Deskripsi desa dan jumlah responden rumah tangga program Demapan mandiri menurut kabupaten di Provinsi Lampung, 2015	5
2. Karakteristik rumah tangga kelompok afinitas dan bukan Kelompok afinitas program demapan status mandiri di Provinsi Lampung, 2015	8
3. Rataan kepemilikan aset rumah tangga kelompok afinitas dan Bukan kelompok afinitas demapan status mandiri di Provinsi Lampung, awal program dan 2015	9
4. Keikutsertaan rumah tangga dalam kegiatan kelompok afinitas Demapan status mandiri di Provinsi lampung, selama periode Dan 2015	11
5. Keikutsertaan rumah tangga kelompok afinitas dalam kegiatan Simpan pinjam dan pemanfaatannya pada program demapan Status mandiri di Provinsi lampung, selama periode program dan 2015	13
6. Proporsi tingkat ketahanan pangan rumah tangga kelompok afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi Lampungsebelum program dan 2015 (%)	15
7. Kinerja produksi dan cadangan pangan rumah tangga afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi lampung, awal program dan 2015	17
8. Kinerja pendapatan dan pemanfaatan pekarangan rumah Tangga kelompok afinitas pada program demapan status	

mandiri Di Provinsi lampung, awal program dan 2015 (%)	19
9. Kinerja distribusi dan pemasaran pangan rumah tangga kelompok afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi lampung, awal program 2015	21
10. Kinerja aspek konsumsi pangan rumah tangga kelompok afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi lampung, awal program dan 2015	23
11. Proporsi tingkat rawan pangan rumah tangga kelompok afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi lampung, sebelum program dan 2015 (%)	25
12. Keragaan rawan pangan rumah tangga kelompok afinitas dan bukan kelompok afinitas pada program demapan status mandiri di Provinsi lampung, sebelum program dan 2015.....	26
13. Proporsi Tingkat Kemiskinan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)	27
14. Kondisi Rumah Tinggal Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) dan Bukan Kelompok Afinitas (Bukan-KA) pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)	28
15. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) dan Bukan Kelompok Afinitas (Bukan-KA) pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)	29
16. Proporsi Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) menurut Dinamika Pola Pikir pada Program Demapan	

Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)	31
17. Eksistensi Pengaruh Positif dan Dampak Demapan Terhadap Rumahtangga Bukan KA di Provinsi Lampung, 2015 (%).....	34
18. Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan di Provinsi Lampung, Selama Priode Program dan 2015 (%).....	37
19. Keragaan Ketersediaan Pangan Rumahtangga Miskin Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung Awal Program dan 2015	40
20. Keragaan Distribusi Pangan Rumahtangga Miskin Tingkat Desa Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015	42
21. Keragaan Konsumsi Pangan Rumahtangga Miskin Tingkat Demapan StatusMandiri di Provinsi , Awal Program dan 2015 (%)	43
22. Keragaan Rawan Pangan Rumahtangga Miskin Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015 (%).....	44
23. Dinamika Proposi Rumahtangga Miskin Terkait dengan 14 Indikator Kemiskinan Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program Demapan dan 2015 (%).....	45
24. Eksistensi dan Dampak Kelembagaan Demapan di Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, 2015 (%)	47
25. Proposi Rumahtangga Terhadap Perubahan Pola Pikir di Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, 2015 (%).....	49
26. Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan di Tingkat Demapan di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015 (%)	50

27. Eksistensi Program Lintas Sektoral di Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015	51
28. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumahtangga terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung, 2015	53
29. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak Program Pemberdayaan PNPM Mandiri Terhadap Kinerja Demapan di Provinsi , 2015	53
30. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak Program Pemberdayaan UKM terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung, 2015	54
31. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pencapaian Ketahanan Pangan di Tingkat Demapan	55
32. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pengentasan Rawan Pangan di Tingkat Demapan	55
33. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pengentasan Kemiskinan di Tingkat Demapan	56

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan. Landasan perwujudan ketahanan pangan dan kemandirian pangan adalah pasal 3 Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil merata, dan berkelanjutan berdasarkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Salah satu tujuan penyelenggaraan pangan tersebut adalah untuk mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang rawan pangan dan gizi (Undang-undang No. 18 tahun 2012 pasal 4).

Untuk mewujudkan kemandirian pangan dilakukan pemberdayaan masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui strategi jalur ganda/*twin track strategy*, yang meliputi: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung (Kementerian Pertanian, 2011). Dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan tersebut Pemerintah melalui Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian sejak tahun 2006 meluncurkan Kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan tersebut diharapkan dapat mendorong kemampuan masyarakat desa untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi keluarganya, sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif.

Perwujudan ketahanan pangan dan gizi masyarakat dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang pemecahan masalah, serta mampu mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Kegiatan Demapan dilaksanakan dalam waktu empat tahun melalui empat tahap yaitu persiapan, penumbuhan, pengembangan, dan kemandirian.

Pengertian Demapan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan. Adapun tujuan kegiatan Demapan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya yang dimiliki atau dikuasainya untuk mencapai kemandirian pangan rumah

tangga dan masyarakat. Sasaran kegiatan adalah rumah tangga miskin di desa rawan pangan untuk mewujudkan kemandirian pangan masyarakat.

Kegiatan Demapan di Provinsi Lampung dimulai bersamaan dengan peluncuran program tersebut secara nasional yaitu pada tahun 2006. Sampai dengan tahun 2012 kegiatan Demapan di Provinsi Lampung telah dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang tersebar di 73 desa dimana 24 desa lokasi tersebut telah memasuki tahap kemandirian sesuai target keprograman.

Pada tahap kemandirian, diharapkan telah berfungsinya mekanisme kelembagaan yang ada di pedesaan (Lembaga Keuangan Desa/LKD, Kelompok Afinitas/KA, Tim Pangan Desa/TPD) sebagai lembaga layanan sosial dan layanan ekonomi. Kondisi ini dapat mendorong dan bahkan dapat menjamin keberdayaan masyarakat dalam memenuhi kecukupan dan ketersediaan pangan, memenuhi kebutuhan ekonomi dan layanan kesehatan, meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya rumah tangga miskin, memperluas distribusi pemasaran dan daya beli masyarakat, serta memberikan manfaat bagi desa sekitarnya. *Tahap kemandirian* di tahun keempat, diharapkan terjadi perubahan pada: (1) Dinamika kelompok afinitas meningkat, yang ditandai dari: usaha ekonomi produktif telah mampu meningkatkan daya beli, serta berfungsinya lembaga-lembaga layanan kesehatan, permodalan, kemudahan akses produksi, dan pemasaran pertanian; (2) Jaringan kemitraan meningkat, yang ditandai munculnya usaha kecil dan usaha mikro perdesaan di bidang pangan dan non pangan, tumbuhnya Gapoktan yang mandiri, dan berfungsinya LKD sebagai layanan modal; (3) Pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat; (4) TPD telah berfungsi/mampu menggerakkan dan mengkoordinasikan program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan di desa, yang ditandai dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendukung usaha tani melalui program/kegiatan lintas subsektor dan sektor yang berdampak terhadap kemampuan akses fisik dan ekonomi masyarakat desa setempat dan desa sekitarnya; dan (5) Sistem ketahanan pangan telah bekerja, yang ditandai dengan ketersediaan dan kecukupan pangan, jaminan distribusi pangan antar wilayah wilayah dan antar waktu, tingkat harga pangan yang stabil sesuai mekanisme pasar, serta jaminan konsumsi pangan yang cukup, bergizi, beragam, seimbang, dan aman sampai tingkat rumah tangga.

Untuk mengetahui sejauh mana Kegiatan Demapan berdampak bagi masyarakat pelaksana kegiatan dan masyarakat sekitarnya dalam upaya pengentasan rawan pangan dan

kemiskinan, maka perlu dilaksanakan evaluasi dampak pelaksanaan kegiatan Desa Mandiri Pangan.

1.2. Tujuan

- 1) Mengetahui dampak kegiatan Desa Mandiri Pangan terhadap: (a) peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengembangan usaha produktif berbasis sumberdaya lokal, (b) peningkatan ketersediaan dan pembentukan akses pasar serta posisi tawar rumah tangga anggota KA, (c) penguatan kelembagaan di masyarakat, (d) peningkatan daya beli dan pendapatan serta akses pangan rumah tangga, (e) penurunan angka kemiskinan, (f) penurunan kerawanan pangan, (g) peningkatan ketahanan pangan, (h) perubahan pola pikir masyarakat (*mind set*) terhadap kegiatan pemberdayaan dan pendampingan.
- 2) Mengetahui tingkat ketahanan pangan masyarakat.
- 3) Mengkaji pengembangan potensi wilayah untuk mendukung swasembada pangan.

II. METODE PENELITIAN

2.1 Pemilihan Kabupaten dan Desa Penelitian

Penelitian evaluasi dampak Demapan dilaksanakan di 16 desa diantara 73 desa pelaksana Program Demapan di Provinsi Lampung, dimana pemilihan desa lokasi didasarkan pada: (a) perbedaan tahun mulai Program Demapan, (b) cakupan terhadap seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung, dan (c) proporsi jumlah desa pelaksana Program Demapan di setiap kabupaten/kota.

Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka hampir seluruh kabupaten/ kota di Provinsi Lampung terakomodasi sebagai lokasi penelitian, kecuali Kabupaten Pesisir Barat sebagai kabupaten termuda. Dengan pertimbangan proporsi desa pelaksana Program Demapan, maka kabupaten yang memiliki desa pelaksana lebih banyak dipilih sampel desa lebih dari satu (dua). Penelitian ini melibatkan desa-desa pelaksana Program Demapan yang memulai program tahun 2009, 2010, 2011, dan 2012 yang berarti telah mencapai tahap kemandirian dan pasca kemandirian.

2.2 Jenis dan Jumlah Responden

Penelitian ini pada hakekatnya adalah menganalisis dampak Program Demapan terhadap ketahanan pangan dan kemiskinan di tingkat rumah tangga miskin di desa pelaksana Program Demapan. Sesuai dengan hakekat tersebut maka informasi yang dikumpulkan disesuaikan dengan hakekat tersebut. Oleh karena bermaksud menganalisis dampak Program Demapan maka informasi yang diperlukan dikumpulkan dari seluruh komponen masyarakat yang ada di desa, baik yang terlibat maupun tidak terlibat dalam Program Demapan.

Sumber informasi dalam penelitian ini dapat dipilah menjadi tiga yaitu rumah tangga miskin anggota kelompok afinitas, rumah tangga miskin bukan anggota kelompok afinitas, dan kelompok pemangku kepentingan terkait dengan Demapan. Sehubungan dengan hal tersebut maka kuesioner yang digunakan terdiri dari tiga macam sesuai dengan masing-masing sumber informasinya.

Jenis dan jumlah responden pada penelitian ini untuk setiap desa adalah: (a) rumah tangga miskin anggota KA berjumlah 15 orang, (b) rumah tangga miskin bukan anggota KA juga berjumlah 15 orang, serta (c) kelompok pemangku kepentingan terkait dengan Demapan kelompok pemangku kepentingan terkait dengan Demapan yang terdiri dari antara lain ketua/pengurus/anggota KA, TPD, aparat desa di luar TPD, LKD, dan tokoh masyarakat di luar TPD yang memiliki pengetahuan tentang kinerja dan dampak Program Demapan yang berjumlah sekitar 10 orang. Sampel (responden) ditentukan secara *accidental sampling*. Deskripsi desa dan jumlah responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Desa dan Jumlah Responden Rumahtangga Program Demapan Mandiri Menurut Kabupaten di Provinsi Lampung, 2015

Kabupaten	Nama Desa	Jumlah Responden		
		Anggota KA	Bukan KA	FGD Peserta (orang)
1. Lampung Timur	1. Sukorahayu	15	15	10
	2. Labuhan Maringgai	15	15	6
3. Lampung Tengah	1. Kenanga Sari	15	15	12
3. Bandar Lampung	1. Waykandis	15	15	8
4. Mesuji	1. Fajar Sari	15	15	10
5. Tulang Bawang	1. Ringin sari	15	15	10
6. Metro	1. Hadi Mulyo Barat	15	15	10
	2. Rejo Mulyo	15	15	10
7. Lampung Utara	1. Sawo Jajar	15	15	16

8. Lampung Barat	1. Rigis Jaya	15	15	11
	2. Pampangan	15	15	11
9. Way Kanan	1. Sri Rejeki	15	15	10
10. Pesawaran	1. Sinar Bandung	15	15	10
11. Tanggamus	1. Way Ilahan	15	15	10
	2. Banyu Urip	15	15	10
12. Lampung Selatan	1. Lebung Nala	15	15	10

2.3 Pengumpulan dan Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan tatap muka dengan responden serta dengan *Focus Group Discussion (FGD)*. Baik wawancara maupun FGD dilaksanakan dengan berpedoman pada kuesioner yang telah dipersiapkan, dimana dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam kuesioner yaitu: A kuesioner rumah tangga miskin anggota KA, B kuesioner non anggota KA, dan C kuesioner untuk FGD (Terlampir).

Data yang terkumpul ditabulasi dan diolah menggunakan Program Exel dan *Statistical Programe for Social Science (SPSS)*. Analisis data dilakukan dengan analisis statistik deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Karakteristik, Penguasaan Aset, dan Partisipasi Rumah Tangga Miskin

3.1.1 Karakteristik Rumah Tangga Miskin

Karakteristik Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung dalam penelitian ini, terdiri dari: umur Kepala Keluarga, jenis kelamin, status dalam kelompok, status perkawinan, pekerjaan utama, tingkat pendidikan Kepala Keluarga, dan jumlah anggota keluarga. Lebih jelasnya karakteristik Rumah Tangga Miskin di Provinsi Lampung disajikan pada Tabel 2.

Pada Tabel 2 terlihat bahwa umur rata-rata Kepala Keluarga Rumah Tangga Miskin anggota Kelompok Afinitas (KA) maupun bukan anggota KA tergolong usia produktif. Dari 240 responden terpilih, jumlah terbanyak adalah laki-laki, baik untuk anggota KA maupun bukan KA. Status responden di dalam KA adalah sebagian besar (65) sebagai anggota, dan sisanya sebagai pengurus.

Pada Tabel 2 juga terlihat bahwa sebagian besar (93) sudah menikah, serta sisanya belum menikah dan janda/duda. Pekerjaan utama Rumah Tangga Miskin KA maupun bukan KA tidak jauh berbeda, yaitu sebagian besar adalah usaha di bidang pertanian yang masing-masing 103 orang (42) dan 107 orang (44). Sebagai buruh pertanian menempati urutan kedua (seperti responden di Desa Fajar Sari Mesuji sebagai buruh pada PT Barat Selatan Makmur Investido (BSMI), dan di Desa Ringin Sari Tulang Bawang sebagai buruh di PT> Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL), sedangkan sebagian kecil usaha non pertanian, seperti usaha dagang (warung kebutuhan rumah tangga), toko HP dan pulsa (Counter).

Jika dilihat dari tingkat pendidikan Kepala Keluarga anggota KA, didapatkan sebagian besar yaitu 125 orang (52) berpendidikan SD, Perguruan Tinggi hanya 3 orang. Secara keseluruhan tingkat pendidikan bukan anggota KA relatif lebih tinggi dibandingkan anggota.

Berdasarkan sebaran usia, nampaknya usia anggota Rumah Tangga Kelompok Afinitas maupun bukan Kelompok Afinitas relatif sama jumlah maupun proporsinya, yaitu didominasi usia produktif 15-55 tahun, diikuti usia sekolah < 15 tahun, dan hanya sedikit yang berusia > 55 tahun.

Tabel 2. Karakteristik Rumah Tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, 2015

No	Karakteristik	KA	Bukan KA
1.	Umur kepala keluarga (tahun)	39,8	44,2
2.	Jenis kelamin (orang)		
	• Laki-laki	187	171
	• Wanita	53	69
3.	Status dalam kelompok (orang)		
	• Pengurus	84	-
	• Anggota	158	-
4.	Status perkawinan (orang)		
	• Menikah	224	233
	• Belum menikah	12	5

	• Janda/duda	4	4
5.	Pekerjaan utama (orang)		
	• Usaha pertanian	103	107
	• Buruh pertanian	76	77
	• Usaha non-pertanian	7	6
	• Buruh non-pertanian	13	12
	• Jasa, dan lain-lain	41	40
6.	Tingkat pendidikan kepala keluarga (orang)		
	• ≤ SD	125	109
	• ≤ SLTP	55	70
	• ≤ SLTA	56	58
	• ≤ Diploma	0	1
	• ≤ Universitas	3	4
7.	Jumlah anggota rumahtangga (orang)		
	• < 15 tahun	185	177
	• 15 – 55 tahun	231	224
	• > 55 tahun	32	46

3.1.2 Penguasaan Aset Rumah tangga Miskin

Kepemilikan aset rumah tangga KA dan Bukan KA dikelompokkan menjadi: kepemilikan lahan, kepemilikan hewan, dan kepemilikan asset rumahtangga, yang disajikan pada Tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kepemilikan lahan rumah tangga KA terdiri dari lahan sawah 0,9 Ha/RT, tegalan/kebun rata-rata 0,5 Ha/RT, pekarangan rata-rata sangat kecil yaitu kurang dari 0,1 Ha/RT. Jika dilihat dari awal program tahun 2009 sampai tahun 2015 ada kecenderungan sedikit meningkat, namun tidak satupun responden memiliki tambak dari awal program sampai tahun 2015.

Tabel 3. Rataan Kepemilikan Asset RumahTangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015

No	Pemilikan Asset	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
1.	Kepemilikan lahan (Ha/RT)	0,8566	0,8926	0,702
	a. Sawah	0,2336	0,2430	0,186
	b. Tegalan/lahan kering/kebun	0,5282	0,5267	0,344
	c. Pekarangan	0,0709	0,0806	0,099
	d. Tambak	0,0000	0,0000	0
2.	Kepemilikan hewan (Ekor/RT)			
	a. Sapi	0,1250	0,1458	0,095
	b. Kerbau	0	0	0,045
	c. Kambing/domba	0,4250	0,6	0,83
	d. Ayam	6,0167	5,0458	4,1

	e. Bebek/entok	0,5083	0,9250	0,52
	f. Babi	0	0	0
	g. Kuda	0	0	0
	h. Lainnya	0,8333	1,6458	0,416
3.	Kepemilikan aset rumahtangga (buah/RT)			
	a. Televisi	0,629	1,1125	0,925
	b. Radio/tape recorder	0,225	0,133	0,183
	c. Kulkas	0,341	0,383	0,391
	d. Telepon /HP	0,920	1,225	0,9
	e. Kasur/tempat tidur	1,995	2,270	1,35
	f. Lemari/buffet	2,016	1,645	1,28
	g. Sepeda/perahu/becak/gerobak	0,95	0,754	0,412
	h. Sepeda motor/perahu motor	0,758	1,008	0,712
	i. Mobil/kapal motor	0,162	0,1912	0,041
	j. Tabungan dibank/rumah	108,333	187,083	517,125
	k. Perhiasan emas	0,564	0,751	0,88

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa program Demapan mempunyai dampak terhadap penguasaan asset lahan peserta program, walaupun sedikit. Sedangkan aset lahan rumah tangga bukan anggota KA rata-rata lebih kecil dibanding anggota kelompok, hal ini dikarenakan sebagian rumah tangga bukan anggota KA tidak mempunyai lahan dan hanya bekerja sebagai buruh pertanian atau buruh di perusahaan sekitar tempat tinggal.

Jika dilihat dari kepemilikan hewan, didapatkan rumah tangga rata-rata memiliki hewan. Berdasarkan jenisnya yang paling banyak adalah ayam, baik pada anggota KA (pada awal program/tahun 2009 sampai tahun 2015) maupun anggota bukan KA, dan untuk hewan lainnya seperti sapi, bebek dan kambing dalam jumlah sangat kecil. Tidak satupun anggota KA maupun bukan KA yang memiliki hewan babi dan kuda, sedangkan kerbau hanya dimiliki bukan KA, namun sangat sedikit. Pada anggota KA, tahun 2015 ada kenaikan sedikit sekali jumlah rata-rata sapi, kambing, dan bebek. Hal ini menunjukkan bahwa program Demapan berdampak positif walaupun kecil terhadap penguasaan asset hewan/ternak peserta program. Pada responden bukan KA, kepemilikan hewan rata-rata mempunyai sebaran jenis yang hampir sama tetapi jumlahnya lebih kecil dibanding anggota KA.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa kepemilikan aset rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA relatif sama. Ada kenaikan jumlah pada beberapa jenis asset rumah tangga, seperti televisi, kulkas, telpon/HP, sepeda motor, dan perhiasan emas. Seiring dengan dukungan dari pemerintah, telah dipasangnya listrik di lokasi-lokasi Demapan, dan adanya perkembangan kebutuhan akan komunikasi dan transportasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa program Demapan berdampak positif terhadap penguasaan asset rumah tangga peserta program.

3.1.3 Partisipasi dalam Kegiatan Kelompok Afinitas

Partisipasi Rumah Tangga KA dalam kegiatan Kelompok selama periode program dan tahun 2015 meliputi: eksistensi iuran kelompok, (keikutsertaan waktu pembayaran, besarnya pembayaran, dan frekuensi pembayaran), eksistensi pertemuan rutin/rapat anggota kelompok, dan partisipasi dalam pelatihan. Partisipasi Rumah Tangga KA dalam kegiatan Kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4 menjelaskan bahwa partisipasi iuran kelompok pada periode program adalah 36,1 dengan besar iuran rata-rata Rp25.956,00 dengan waktu pembayaran lebih banyak dilakukan setiap bulan, dan sesuai dengan kesepakatan sebesar 30,4 pada periode program dan menurun pada tahun 2015.

Tabel 4. Keikutsertaan Rumah Tangga dalam Kegiatan KA Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Selama Priode Program dan 2015

No	Kegiatan Kelompok	Periode Program	2015
1.	Eksistensi iuran kelompok (%)	36,1	14,8
2.	Rataan besar iuran (Rp.)	25.956	13.784
3.	Partisipasi waktu pembayaran iuran (%)		
	a. Per bulan	19,9	9,1
	b. Setelah panen	4,7	3,8
	c. Per tahun	15,6	7,3
4.	Partisipasi pembayaran iuran (%)	27,6	16,4
5.	Frekuensi pembayaran iuran (%)		
	a. Sesuai Kesepakatan	30,4	19,9
	b. Kadang-kadang	0,3	0,3
6.	Eksistensi pertemuan rutin/rapat anggota kelompok (%)	72,4	56,3
7.	Frekuensi pertemuan rutin (kali/bulan)	0,3	0,3
8.	Partisipasi dalam pertemuan rutin (%)		
	a. Selalu	47,2	36,4
	b. Kadang-kadang	31,8	17,0
	c. Tidak Pernah	4,9	1,0
9.	Partisipasi dalam pelatihan (%)	43,0	31,7
10.	Partisipasi dalam pelatihan menurut materi (%)		
	a. Administrasi	19,9	13,3
	b. Budidaya	26,2	18,2
	c. Kerajinan	5,2	1,0
	d. Pengolahan hasil	10,5	7,7
	e. Keuangan mikro	10,8	10,1
	f. Pemasaran	0,6	3,5
	g. Lainnya	4,5	1,7

Keikutsertaan rumah tangga KA dalam kegiatan pertemuan rutin/rapat anggota kelompok sebesar 72,4 pada periode atau awal program dan sedikit menurun menjadi 56,3

pada tahun 2015, hal ini disebabkan pada awal program berjalan anggota KA lebih semangat dan rutin melakukan pertemuan/rapat yang membahas mengenai peraturan di dalam KA seperti mengatur/menetapkan modal usaha kelompok, syarat pinjam, sanksi, pola dan waktu pengembalian pinjaman, serta menentukan iuran wajib/sukarela.

Partisipasi rumah tangga dalam pelatihan selama periode program mencapai 43,0, terutama terkait dengan materi budidaya pertanian 26,2, administrasi 19,9, keuangan mikro 10,8, pengolahan hasil 10,5, dan kerajinan 5,2. Pada tahun 2015 partisipasi pelatihan sedikit menurun, hal ini disebabkan karena beberapa kegiatan yang dilakukan pada awal program sudah tidak rutin dilakukan lagi, hasil wawancara dan pengamatan di beberapa desa menunjukkan bahwa beberapa rumah tangga miskin sudah mempunyai pekerjaan lain selain ikut program, seperti bekerja di perusahaan (PT) sekitar tempat tinggal, dan sebagai tukang ojek, namun mereka masih sangat mendambakan pembinaan/pelatihan yang berkesinambungan, karena masih ada potensi sumber daya yang belum dan masih bisa dikembangkan yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka. Salah satu contoh adalah potensi usaha perikanan di Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur.

Pada Tabel 5 terlihat bahwa partisipasi rumah tangga kelompok afinitas dalam kegiatan simpan pinjam pada periode program dilakukan sebanyak 49,3, dan menurun pada tahun 2015. Hal ini terjadi karena sebagian pengembalian pinjaman macet dengan berbagai alasan, seperti kegagalan panen atau matinya hewan peliharaan (seperti kambing), dan kurang ketatnya sistem pengawasan atau sanksi bagi yang tidak mengembalikan. Simpan pinjam yang dilakukan berupa simpan pinjam uang.

Pada umumnya setiap rumah tangga bisa meminjam rata-rata Rp.1.000.000 per tahun, sebanyak 1-2 kali setahun dengan bunga kisaran 1--2 per bulan. Uang pinjaman ini digunakan untuk usaha budidaya pertanian khususnya untuk membeli saprodi, dan untuk UKM non pertanian, namun ada juga yang digunakan untuk konsumsi, serta keperluan lainnya seperti untuk membuka counter, pengobatan, pendidikan anak, dan bayar hutang. Hal ini tentu tidak sesuai dengan tujuan pemberian bantuan yang menginginkan untuk peningkatan usaha. Dalam hal ini, saran untuk program ke depan, bantuan berupa uang harus dipertimbangkan dan dipersiapkan lebih matang baik perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasannya agar berjalan lebih baik. Bagi kelompok yang masih jalan simpan-pinjamnya sampai tahun 2015, aturan yang berlaku relatif tetap. Pada Tabel 5 juga terlihat bahwa program Demapan memiliki dampak menurunkan pinjaman uang ke pelepas uang (rentenir).

Tabel 5. Keikutsertaan Rumahtangga Kelompok Afinitas dalam Kegiatan Simpan Pinjam dan Pemanfaatannya pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015

No	Kinerja Simpan Pinjam	Periode Program	2015
1.	Eksistensi kegiatan simpan pinjam (%)	49,3	31,7
2.	Kegiatan menabung sebagai kewajiban (%)	12,9	10,1
3.	Rataan besar tabungan (Rp/Bulan)	25.270	22.414
4.	Partisipasi rumahtangga dalam kegiatan meminjam (%)	66,1	39,0
5.	Frekuensi pinjaman per tahun (%)		
	a. 1 kali	60,5	30,3
	b. 2 kali	8,4	8,0
	c. 3 kali	0,0	0,0
	d. 4 kali	0,0	0,0
	e. > 4 kali	0,0	0,0
6.	Rataan nilai pinjaman (Rp/Tahun)	996.263	1.614.107
7.	Bunga pinjaman (/bulan)	1	2
8.	Partisipasi meminjam ke pelepas uang (%)	3,1	2,1
9.	Penggunaan utama pinjaman (%)		
	a. Usaha budidaya pertanian	38,5	26,1
	b. Usaha pengolahan pertanian	2,1	0,3
	c. UKM non-pertanian	7,0	2,8
	d. Konsumsi	11,9	5,2
	e. Usaha jasa (ojek)	0,3	0,3
	f. Lainnya	13,6	5,2

3.2. Dinamika Ketahanan Pangan dan Rawan Pangan RT Miskin

3.2.1 Dinamika Ketahanan Pangan

Dinamika ketahanan pangan merupakan gambaran kondisi tinggi rendahnya tingkat ketahanan pangan suatu wilayah yang ditunjukkan melalui beberapa kategori. Melalui dinamika ketahanan pangan ini dapat diketahui perbedaan tingkat ketahanan pangan di suatu wilayah pada waktu yang tidak sama disamping perbedaannya antar wilayah. Berdasarkan kajian yang dilakukan diketahui bahwa terdapat tingkat ketahanan pangan rumah tangga yang berbeda di wilayah Propinsi Lampung pada kurun waktu sebelum program Demapan dengan kondisi saat ini (2015) diantara kelompok afinitas (KA) dan bukan kelompok afinitas (KA). Sebelum program demapan pada KA didapatkan proporsi tertinggi rumahtangga dengan kategori tidak tahan pangan sebanyak 42,9 persen dan jumlahn ya meningkat menjadi 50,41 persen pada tahun 2015. Proposrsi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan bukan KA yaitu sebanyak 64,2 persen. Jika dilihat secara keseluruhan baik pada rumahtangga KA maupun bukan KA memiliki kondisi ketahanan yang tidak jauh berbeda dimana proporsi

tertinggi ditemukan pada kategori rumah tangga tidak tahan pangan dan kurang tahan pangan. Sebaliknya rumah tangga dengan kategori tahan pangan hanya dimiliki oleh sedikit rumahtangga baik pada KA maupun bukan KA, dan proporsi inipun mengalami penurunan pada saat ini (2015) sebanyak 6,23 persen dibandingkan sebelum program demapan, akan tetapi proporsinya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rumahtangga bukan KA (2,90). Secara rinci proporsi tingkat ketahanan pangan rumahtangga KA dan Bukan KA pada Program Demapan status mandiri di Provinsi Lampung, sebelum program dan 2015 disajikan pada Tabel 6.

Adanya perbedaan kategori tingkat ketahanan pangan rumahtangga pada KA sebelum program demapan maupun dengan bukan KA ditentukan oleh beberapa hal. Sebagaimana diketahui bahwa ketahanan pangan baik pada tingkat nasional maupun wilayah ditentukan oleh tiga pilar atau subsistem yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi dimana masing-masing memiliki indikator yang dapat dijadikan dasar pengukuran keberhasilan kinerja subsistemnya (Indriani, 2015). Dengan kata lain bahwa tinggi rendahnya kinerja ketahanan pangan suatu wilayah akan sangat tergantung pada kinerja masing-masing subsistem yang mendukungnya dimana pada akhirnya ketahanan pangan yang baik akan membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan produktif. Suryana (2004) menegaskan bahwa melalui ketahanan pangan yang baik, didukung oleh kemampuan rumahtangga mengelola konsumsi, sanitasi serta perawatan kesehatan yang baik, maka akan didapatkan status gizi individu yang baik. Status gizi yang baik (balita, anak usia sekolah, wanita usia subur) merupakan basis bagi pembentukan generasi yang sehat, yang jika didukung oleh pendidikan yang baik akan membentuk sumberdaya manusia yang berkualitas dan produktif.

Tabel 6. Proporsi Tingkat Ketahanan Pangan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Tingkat Kemiskinan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Sebelum Program	2015	
1.	Sangat tidak tahan pangan	2,5	15,00	0
2.	Tidak tahan pangan	42,9	50,41	64,2
3.	Kurang tahan pangan	41,7	27,92	32,9
4.	Tahan pangan	12,9	6,67	2,9

3.2.2. Dinamika Ketersediaan Pangan

Telah dikemukakan sebelumnya bahwa ketersediaan pangan merupakan salah satu subsistem ketahanan pangan yang besarnya akan memberikan kontribusi terhadap tinggi rendahnya ketahanan pangan yang dimiliki suatu wilayah. Sebagai salah satu subsistem ketahanan pangan, subsistem ketersediaan pangan memiliki indikator sendiri yaitu dengan melihat kecukupan serta stabilitas ketersediaan pangan dalam rumah tangga. Kecukupan ketersediaan pangan dalam rumah tangga antara lain dengan mengukur pangan pokok yang cukup dan tersedia yaitu jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Untuk daerah pertanian, penentuan jangka waktu ketersediaan makanan pokok beras dengan mempertimbangkan jarak antar musim tanam dengan musim tanam berikutnya. Untuk stabilitas ketersediaan pangan tingkat rumah tangga diukur berdasarkan kecukupan ketersediaan pangan dan frekuensi makan anggota rumah tangga dalam sehari.

Kinerja tinggi rendahnya ketersediaan pangan rumah tangga pada KA sebelum program demapan dan saat ini (2015) serta pada bukan KA di Propinsi Lampung dipengaruhi oleh keberadaan produksi pangan pokok serta cadangan pangan yang dimiliki rumah tangga. Berdasarkan rata-rata produksi pangan pokok baik pada KA maupun bukan KA secara umum masih didominasi oleh produksi beras sebagai pangan pokok masyarakat di propinsi Lampung. Khususnya pada awal program demapan, beras merupakan jenis pangan pokok yang memiliki produksi terbesar bagi rumah tangga KA yaitu sebesar 2.687 kg/tahun yang diikuti ubi kayu sebesar 695 kg/tahun dan jagung sebesar 219 kg/tahun, sedangkan jenis pangan lainnya seperti talas dan sagu tidak diproduksi (0). Situasi ini mengalami peningkatan saat ini (2015) pada komoditas jagung dan ubi kayu sedangkan beras mengalami penurunan produksi yang cukup drastis sebanyak 2416 kg/tahun atau 89,91 persen dibandingkan rata-rata produksi pada awal program. Situasi sedikit berbeda ditemukan pada rumah tangga bukan KA dimana rata-rata produksi terbesar terdapat pada komoditas ubi kayu sebesar 735 kg/tahun, sedangkan beras menjadi urutan kedua dengan jumlah produksi 431 kg/tahun yang diikuti jagung di tempat ketiga dengan produksi 17 kg/tahun. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi produksi, ubi kayu dapat menjadi alternatif pengganti beras sebagai pangan pokok masyarakat.

Kecenderungan adanya penurunan rata-rata produksi pangan pokok pada rumah tangga KA ini tampak sejalan dengan status produksi pangan pokok rumah tangga. Proporsi rumah tangga yang rata-rata produksi pangan pokoknya sama dengan rata-rata produksi rumah tangga KA yang mengalami penurunan pada saat ini (2015) yaitu dari 38,1 persen menjadi 12,8 persen. Hal ini sejalan dengan terjadinya peningkatan proporsi rumah tangga yang rata-rata produksi pangan pokoknya kurang dari rata-rata produksi pangan

dari 36,1 persen pada awal program menjadi 64,0 persen tahun 2015. Jika dilihat dari rata-rata kebutuhan pangan pokok, terdapat kecenderungan yang sama pada rumah tangga KA yang mengalami penurunan yaitu dari 410 kg/tahun pada awal program menjadi 405 kg/tahun akan tetapi jumlah ini masih lebih besar dibandingkan rata-rata kebutuhan pangan pokok rumah tangga bukan KA yang besarnya 369 kg/tahun.. Situasi ini sejalan dengan proporsi rumah tangga KA yang status ketersediaan pangan rumah tangganya sama dengan kebutuhan konsumsinya mengalami penurunan yang drastis yaitu sebesar 14,6 persen pada tahun 2015.

Sebanyak 20,7 persen proporsi rumah tangga KA yang status ketersediaan pangan rumah tangganya kurang dari kebutuhan konsumsinya mengalami peningkatan tahun 2015 harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan pangannya dengan berbagai cara. Hal ini terkait dengan luas lahan yang dimiliki sangat rendah sehingga umumnya rumah tangga tersebut akan bekerja keras menjadi buruh baik buruh tani maupun buruh non pertanian disamping mencari pinjaman kepada tetangga, keluarga atau ke warung.

Tabel 7. Kinerja Produksi dan Cadangan Pangan Rumah tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015

No	Produksi dan Cadangan Pangan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
1.	Rataan produksi pangan pokok rumah tangga (kg/tahun)			
	a. Beras	2687	271	431
	b. Jagung	219	299	17
	c. Singkong/ubi kayu	695	694	735
	d. Ubi jalar	0,2	12	0,4
	e. Talas	0,08	0	0,1
	f. Sagu	0	0	0
	g.	0	0	0
2.	Rataan produksi pangan pokok anggota KA (kg/tahun)			
	a. Beras	222	255	1608
	b. Jagung	219	45	125
	c. Singkong/ubi kayu	698	676	2644
	d. Ubi jalar	0,02	13	0
	e. Talas	0,08	0	0
	f. Sagu	0	0	0
	g.	0	0	0
3.	Status produksi pangan pokok (%)			
	a. Produksi > Rata-rata produksi KA	24,2	22,7	86,8
	b. Produksi = Rata-rata produksi KA	38,1	12,8	0,8
	c. Produksi < Rata-rata produksi KA.	36,1	64,0	17,6
4.	Eksistensi status kenaikan produksi pangan pokok (%)	9,0	7,4	7,0

No	Produksi dan Cadangan Pangan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
5.	Penyebab kenaikan produksi pangan pokok (%)			
	a. Program Demapan	0,2	0,4	0,0
	b. Program Pemerintah Lainnya	0,4	0,4	0,4
	c. Faktor Iklim	6,4	4,1	6,6

Tabel 7. Lanjutan

No	Produksi dan Cadangan Pangan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
	d. Kombinasi 1 dan 2	0,0	0,4	0,0
	e. kombinasi 1 dan 3	2,0	3,3	1,7
	f. kombinasi 2 dan 3	0,0	0,0	0,0
	g. kombinasi 1, 2 dan 3	0,0	0,0	0,0
6.	Rataan kebutuhan pangan pokok rumahtangga (kg/tahun)			
	a. Beras	410	405	369
	b. Jagung	3	1	7
	c. Singkong/ubi kayu	5	2	10
	d. Ubi jalar	1	1	1
	e. Talas	0	0	0
	f. Sagu	0	0	0
	g.	0	0	0
7.	Status kecukupan pangan Rumahtangga			
	a. Ketersediaan pangan RT > kebutuhan konsumsi RT	22,1	19,8	20,7
	b. Ketersediaan pangan RT = kebutuhan konsumsi RT	17,6	3,0	21,1
	c. Ketersediaan pangan RT < kebutuhan konsumsi RT	58,6	79,3	57,4
8.	Cara memenuhi kekurangan kebutuhan pangan (%)			
	a. Bantuan pemerintah	2,05	3,3	3,3
	b. Meminjam natura ke KA	0,00	0,0	0,0
	c. Meminjam uang ke KA	0,00	0,0	0,0
	d. Meminjam natura ke lumbung desa	0,00	0,0	0,0
	e. Lainnya	59,4	65,3	47,2
9.	Eksistensi cadangan pangan Rumahtangga			
	a. Selalu	41,0	42,1	28,0
	b. Kadang-kadang	24,6	26,9	15,0
	c. Tidak pernah	32,6	30,6	42,8

Sedikitnya rumahtangga KA yang memiliki ketersediaan pangan lebih besar dibandingkan kebutuhan konsumsinya, sehingga pada awal program sebagian besar mereka (41,0) mempunyai cadangan pangan untuk sebulan atau lebih dimana proporsinya meningkat menjadi 42,1 persen, sedangkan untuk rumah tangga bukan KA hanya sebesar 28,1 persen. Namun sisanya adalah rumahtangga KA yang kadang-kadang dan tidak pernah mempunyai

cadangan pangan untuk satu bulan kecuali habis panen. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2015 terjadi peningkatan rumah tangga KA maupun bukan KA yang memiliki cadangan pangan sebagai dampak program Demapan (Tabel 7). Peningkatan cadangan pangan rumahtangga disebabkan oleh selain program Demapan juga faktor iklim. Selain itu sebagian besar pemanfaatan dana pada program Demapan adalah dipinjamkan ke anggota kelompok berupa uang atau berupa saprodi khususnya pupuk. Kemudahan untuk membeli pupuk ini yang membuat produksi pangan mereka meningkat.

Tabel 8. Kinerja Pendapatan dan Pemanfaatan Pekarangan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015 (%)

No	Pendapatan dan Pemanfaatan Pekarangan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
1.	Proporsi pendapatan sektor pertanian			
2.	Fungsi pendapatan non-pertanian			
	a. Pelengkap pengeluaran untuk pangan	13,3	11,90	7,1
	b. Mencukupi pengeluaran untuk pangan	19,3	27,20	15,4
	c. Melebihi pengeluaran untuk pangan	6,2	7,00	7,1
3.	Partisipasi pemanfaatan lahan pekarangan	49,0	56,08	62,0
4.	Jenis tanaman yang diusahakan di lahan pekarangan			
	a. Tanaman pangan	9,9	14,8	15,4
	b. Sayur-sayuran	20,2	15,6	16,2
	c. Buah-buahan	23,0	27,2	41,7
	d. Obat-obatan	14,0	18,0	18,8
	e. Lainnya	14,0	13,6	9,6
5.	Tujuan pengusahaan pekarangan			
	a. Kebutuhan konsumsi	34,2	37,0	48,8
	b. Sebagai tambahan pendapatan keluarga	7,4	11,9	8,3
	c. Campuran dari pilihan di atas	5,3	5,8	12,5

Proporsi pendapatan sektor pertanian rumahtangga kelompok afinitas (KA) masih dibawah 50,0 persen dan mengalami penurunan menjadi 39,8 persen, namun jumlah ini masih lebih besar dibandingkan rumahtangga bukan KA (34,2). Sementara pendapatan non pertanian umumnya adalah untuk mencukupi serta sebagai pelengkap pengeluaran untuk pangan. Pendapatan non pertanian pada rumahtangga KA maupun bukan KA lebih banyak untuk mencukupi pengeluaran untuk pangan karena banyak diantara mereka yang tidak mempunyai lahan.

Disamping dari sektor non pertanian, pelengkap pelengkap pengeluaran untuk pangan juga berasal dari upaya pemanfaatan lahan pekarangan yang proporsinya cukup besar yaitu

lebih dari 50,0 persen baik pada rumahtangga KA maupun bukan KA, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumsi maupun untuk tambahan pendapatan keluarga. Apun jenis tanaman yang diusahakan di lahan pekarangan terutama berupa buah-buahan seperti pisang, mangga serta sayuran dan hanya sedikit yang menanam obat-obatan serta tanaman pangan (8). Artinya program demapan mampu memberikan kontribusi positif pada upaya pemanfaatan lahan pekarangan meski dalam proporsi yang tidak banyak, hal ini terkait antara lain perubahan pola pikir, pelatihan, luas pekarangan dan lainnya.

3.2.3. Dinamika Distribusi Pangan

Distribusi pangan yang baik dalam subsistem ketahanan pangan akan mempengaruhi tingkat keterjangkauan pangan oleh masyarakat, baik distribusi fisik, ekonomi maupun sosial. Semakin tinggi/baik distribusi pangan akan semakin tinggi/baik tingkat keterjangkauan pangan oleh masyarakat. Distribusi dan pemasaran pangan rumah tangga kelompok afinitas (KA) dan bukan KA disajikan pada Tabel 9. Secara umum (> 90 pada KA dan > 80 bukan KA) pangan pokok mudah diakses di warung/kios di desa. Ada beberapa desa yang warung/kiosnya tidak menjual pangan pokok karena sebagian masyarakatnya mempunyai cadangan pangan hasil panen sendiri atau walaupun membeli mereka langsung ke penggilingan atau tetangga yang punya cadangan pangan banyak.

Lebih dari 80 persen rumah tangga anggota KA maupun bukan anggota KA dapat menjangkau harga pangan, sisanya tidak dapat menjangkau harga pangan karena tidak mempunyai uang dan harganya mahal. Antara anggota KA dan bukan KA tidak ada perbedaan yang nyata demikian juga antara awal program dan tahun 2015.

Tabel 9. Kinerja Distribusi dan Pemasaran Pangan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program 2015

No	Aspek Distribusi dan Pemasaran	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Awal Program	2015	
1.	Eksistensi ketersediaan pangan pokok di warung/kios di desa (%)			
	a. Selalu	90,5	90,9	85,2
	b. Kadang-kadang	8,2	7,8	5,8
	c. Tidak ada	1,2	1,2	1,6
2.	Penyebab keterbatasan ketersediaan pangan pokok di warung/kios desa (%)			
	a. Permintaan rendah	7,0	7,4	6,8
	b. Sarana transportasi sulit/mahal	1,2	2,1	2,9

3.	Eksistensi akses ekonomi pangan (%) (keterjangkauan kerja)	79,8	88,1	81,2
4.	Penyebab tidak terjangkaunya harga pangan (%)			
	a. Harga mahal	3,3	12,3	11,9
	b. Tidak mempunyai uang	15,6	4,1	9,9
5.	Jarak ke pasar terdekat (km)	4	3	3
6.	Keterkaitan pembangunan pasar dengan Program Demapan (%)	0	0	0
7.	Jenis komoditas yang dijual di pasar (%)			
	a. Pasar hanya menjual padi/beras saja	6,6	0,8	7,8
	b. Pasar menjual produk-produk tanaman pangan	28,6	20,6	39,5
	c. Pasar menjual beberapa komoditas pertanian	64,2	77,4	9,9
8.	Eksistensi penjualan/pemasaran hasil pertanian (%)	53,1	32,5	59,6
9.	Cara pemasaran hasil pertanian (%)			
	a. Dilakukan sendiri	53,5	39,9	32,5
	b. Sebagian dipasarkan bersama KA	0	0	0
	c. Seluruhnya dipasarkan bersama KA	0	0	0

Pasar sebagai tempat menjual hasil produksi dan membeli kebutuhan berjarak tiga (3) sampai empat (4) km dengan umumnya kondisi jalan masih bervariasi mulai dari jalan beraspal hingga yang onderlaag bahkan belum beraspal. Hal ini juga yang menjadi penyebab tertinggalnya desa-desa miskin tersebut. Secara umum pasar menjual berbagai komoditas baik produk tanaman pangan maupun beberapa komoditas pertanian. Artinya secara fisik, distribusi pangan dalam taraf yang cukup terjangkau.

Hasil pertanian rumah tangga anggota KA maupun bukan KA sebagian besar (30-60) dijual namun mereka belum berkelompok dalam memasarkan hasil, masih sendiri-sendiri. Sementara fungsi kelompok seharusnya bisa digunakan untuk pemasaran hasil pertanian anggota. Hal ini bisa dilakukan bila kelompok kompak dan mempunyai modal sebagai pengumpul tingkat desa yang akan langsung memasarkan hasil ke pedagang besar bahkan ke eksportir. Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dampak program Demapan terhadap distribusi pangan belum tampak nyata.

3.2.3. Dinamika Konsumsi Pangan

Konsumsi pangan merupakan pilar ketiga dari ketahanan pangan dimana pemenuhannya harus disesuaikan dengan kebutuhan baik individu maupun kelompok masyarakat. Kelebihan maupun kekurangan konsumsi pangan akan berakibat pada masalah tidak hanya pangan tetapi lebih jauh pada timbulnya masalah gizi. Kinerja konsumsi pangan

rumah tangga Kelompok Afinitas (KA) dan Bukan Kelompok Afinitas (KA) dapat dilihat pada Tabel 10.

Berdasarkan Tabel 10 terlihat bahwa terjadi peningkatan eksistensi pola konsumsi beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA) pada anggota kelompok afinitas (KA) dari awal program dengan tahun 2015 dengan frekuensi makan tiga (3) kali sehari dan volume yang cukup. Namun demikian apabila dibandingkan antara anggota dengan bukan anggota KA terlihat eksistensi anggota KA masih lebih tinggi, berarti keberagaman konsumsi pangan anggota KA lebih baik daripada bukan anggota KA meskipun frekuensi dan volumenya tidak berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa rumahtangga bukan KA lebih mendahulukan jumlah/kuantitas pangan yang dikonsumsi dibandingkan kualitasnya yang mungkin disebabkan tingkat pengetahuan tentang konsumsi pangan B2SA masih belum memadai. Hal ini dapat dilihat dari proporsi rumahtangga bukan KA (90,0) dengan volume makan cukup serta frekuensi tiga (3) kali sehari lebih tinggi dibandingkan rumahtangga KA (80,40). Sebaliknya terjadi pada eksistensi konsumsi pangan B2SA dimana rumahtangga anggota KA lebih tinggi (54,2) dibandingkan rumahtangga bukan anggota KA (28,3).

Tabel 10 Kinerja Aspek Konsumsi Pangan Rumah Tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, selama Periode Program dan 2015

No	Aspek Konsumsi	Anggota KA		Bukan KA
		Awal Program	2015	2015
1.	Eksistensi pola konsumsi B3A (%)	74,47	29,02	18,88
2.	Eksistensi frekuensi makan 3 kali/hari (%)	94,33	97,16	94,40
3.	Eksistensi volume makan “cukup” dalam satu kali makan (%)	90,07	91,49	89,51
4.	Jenis pangan pokok (%)			
	a. Nasi	92,91	100,0	97,20
	b. Jagung	1,42	0	2,80
	c. Ubi	2,84	0,00	0,00
	d. Campuran	2,84	0,00	0,00
5.	Eksistensi pengusaha pangan lokal (%)	53,19	46,10	13,99
6.	Jenis pangan lokal yang diusahakan(*)			
	a. Tanaman pangan	40,00	44,61	30,00
	b. Buah-buahan	24,00	30,77	24,61
	c. Lainnya	30,00	30,00	40,00
7.	Pemanfaatan produksi pangan lokal(*)			
	a. Hanya untuk dikonsumsi saja	69,33	78,46	55,00
	b. Dikonsumsi dan sebagian dijual mentah	18,67	18,46	45,00
	c. Dikonsumsi, sebagian diolah kemudian dijual	12,00	3,07	0,00
8.	Eksistensi pengolahan pangan lokal (%)	11,71	29,08	7,69
	Kinerja pengolahan dan pemasaran pangan			

9.	lokal			
	a. Tidak didukung mesin pengolahan	21,98	19,56	15,38
	b. Pakai mesin, tapi pemasaran belum lancar	9,22	0,00	6,99
	c. Pakai mesin dan pemasaran lancar	2,84	9,22	2,10
10.	Eksistensi cadangan pangan lokal (%)	50,35	47,52	11,89
11.	Bentuk cadangan pangan lokal(*)			
	a. Segar	43,66	11,94	11,76
	b. Tepung	1,41	1,49	5,88
	c. Butiran	47,89	26,86	82,35
	d. Lainnya	3,55	59,70	0,00

Keterangan:

*) Persentase dari frekuensi yang melakukan

Selama pelaksanaan program Demapan tidak tampak ada perubahan pada jenis pangan pokok masyarakat yaitu masih tetap nasi (beras). Meskipun jika dilihat dari produksi pangan pokok, terdapat ubi kayu diproduksi lebih banyak dibandingkan beras terutama pada rumahtangga bukan anggota KA, namun produksi tersebut tidak digunakan untuk konsumsi melainkan dijual. Hal ini sejalan dengan eksistensi perusahaan pangan lokal, dimana beras merupakan komoditas utama dibandingkan komoditas lainnya, bahkan proporsi rumahtangga bukan anggota KA (23,3) lebih tinggi dibandingkan rumahtangga anggota KA (19,6). Ubi kayu menempati urutan kedua dengan persentase rumahtangga yang mengusahakan tidak terlalu banyak yaitu kurang dari 10,0 persen pada rumahtangga anggota KA dan kecenderungannya menurun hingga tahun 2015. Penurunan perusahaan pangan lokal ini diduga terkait dengan adanya perubahan orientasi petani pada tanaman nonpangan (perkebunan). Perubahan orientasi tersebut bahkan juga pada perusahaan tanaman di pekarangan. Dari pengamatan di lapangan terlihat bahwa pada pekarangan rumah petani juga ditanami tanaman perkebunan, pada hal biasanya tanaman lokal ini ditanam di kebun. Namun demikian apabila dilihat jenis tanaman yang ditanam, ternyata tanaman pangan masih mendominasi dibandingkan dengan tanaman yang lain.

Pemanfaatan pangan lokal yang diusahakan oleh rumahtangga anggota KA dan rumahtangga bukan anggota KA tidak jauh berbeda. Pangan lokal sebagian besar dimanfaatkan untuk konsumsi sendiri, sedikit saja rumah tangga yang mengolah pangan lokal yaitu sebesar 10,0 persen rumahtangga anggota KA dan 6,2 persen rumahtangga bukan anggota KA pada tahun 2015. Kondisi inipun sebagian besar tidak didukung oleh mesin pengolahan baik rumahtangga anggota KA (56,2) maupun rumahtangga bukan anggota KA (75,8). Kondisi ini ternyata telah meningkat dibandingkan awal program. Hal ini menyebabkan kinerja pengolahan pangan lokal belum baik karena belum didukung oleh mesin pengolahan.

Dari sejumlah rumah tangga yang mengusahakan pangan lokal ternyata kurang dari setengahnya yang memiliki cadangan pangan local meskipun terjadi sedikit peningkatan selama program Demapan khususnya pada bentuk pangan segar. Namun demikian eksistensi cadangan pangan lokal rumah tangga bukan anggota KA lebih tinggi daripada anggota KA, akan tetapi pada bentuk butiran (beras) rumah tangga bukan anggota KA lebih rendah dibandingkan rumah tangga anggota KA

3.2.3. Dinamika Rawan Pangan

Secara umum baik rumah tangga anggota KA maupun rumah tangga bukan anggota KA sebagian besar berada pada kondisi tidak rawan pangan, dimana proporsinya lebih tinggi pada rumah tangga bukan anggota KA (74,2) dibandingkan rumah tangga anggota KA (63,3) pada tahun 2015. Terjadi kecenderungan peningkatan rumahtangga anggota KA dengan kondisi kurang rawan pangan dan rawan pangan sejak awal program sebesar 2,9 persen untuk kurang rawan pangan dan 1,3 persen yang rawan pangan, sedangkan di sisi lain masih terdapat 0,83 persen rumah tangga bukan anggota KA yang sangat rawan pangan. Hal ini dimungkinkan karena sebagian rumah tangga bukan anggota KA yang miskin tetapi tidak tersentuh oleh program Demapan. Disamping itu kondisi ini mengindikasikan bahwa program Demapan belum mampu memberikan indikasi yang nyata positif terhadap dinamika rawan pangan yang lebih baik. Tingkat kemiskinan dilihat dari aspek keragaan rawan pangan rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Proporsi Tingkat Rawan Pangan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Tingkat Kemiskinan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Sebelum Program	2015	
1.	Sangat rawan pangan	0,00	0,00	0,83
2.	Rawan pangan	0,80	2,10	1,25
3.	Kurang rawan pangan	31,70	34,60	23,75
4.	Tidak rawan pangan	68,00	63,30	74,17

Tingkat kerawanan pangan rumah tangga di desa program Demapan berada pada kondisi yang sedang ditinjau dari beberapa aspek. Ditinjau dari eksistensi kekurangan pangan pokok dalam setahun terlihat masih ditemukan rumahtangga baik anggota KA maupun bukan anggota KA meskipun kecenderungannya menurun pada tahun 2015 sebesar 2,48 persen dan lebih rendah dibandingkan pada bukan anggota KA. Kekurangan pangan pokok ini lebih disebabkan tidak mempunyai uang atau dengan daya beli masyarakat yang rendah.

Kondisi rawan pangan juga digambarkan dengan masih ditemukannya balita dengan status gizi yang kurang baik pada rumah tangga anggota KA maupun rumah tangga bukan anggota KA, dimana kecenderungan jumlahnya meningkat pada rumah tangga anggota KA sebanyak 33,3 persen. Meskipun tidak ditemukan balita, ibu hamil dan ibu menyusui yang malnutrisi pada rumah tangga anggota KA namun kondisi ini masih ditemukan pada rumah tangga bukan anggota KA, yaitu sebanyak lima (5) orang atau 2,08 persen. Berbagai kondisi ini menunjukkan bahwa program Demapan secara umum belum mampu meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di Propinsi Lampung.

Tabel 12. Keragaan Rawan Pangan Rumah Tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, selama Periode Program dan 2015

No	Aspek Rawan Pangan	Anggota KA		Bukan KA
		Awal Program	2015	2015
1.	Eksistensi kekurangan pangan pokok setahun (%)	41,84	36,88	48,25
2.	Penyebab kekurangan pangan pokok (*)			
	a. Tidak mempunyai uang	59,32	51,92	66,67
	b. Gagal panen	40,68	46,15	33,33
	c. Bencana alam	0,00	0,00	0,00
3.	Eksistensi balita dengan berat badan di bawah standar (%)	25,53	29,01	35,66
4.	Eksistensi malnutrisi bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui (%)	2,84	0,00	0,00

3.3 Dinamika Kemiskinan Rumah Tangga Miskin

3.3.1 Dinamika Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan rumah tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas dikelompokkan menjadi: sangat miskin, miskin, kurang sejahtera, dan sejahtera. Proporsi tingkat kemiskinan rumah tangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas dapat dilihat pada Tabel 13. Pada Tabel 13 terlihat bahwa terjadi pergeseran tingkat kemiskinan. Pergeseran tersebut terlihat dari menurunnya proporsi rumah tangga yang termasuk pada sangat miskin dan miskin cukup signifikan, sedangkan di sisi lain ada peningkatan proporsi rumah tangga yang termasuk pada kriteria kurang sejahtera dan sejahtera. Berarti dapat dikatakan bahwa program Demapan memiliki dampak terhadap proporsi tingkat kemiskinan rumah tangga.

Tabel 13. Proporsi Tingkat Kemiskinan Rumahtangga Kelompok Afinitas dan Bukan Kelompok Afinitas pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Tingkat Kemiskinan	Anggota KA		Bukan KA (2015)
		Sebelum Program	2015	
1.	Sangat miskin	0,83	0,42	0,00
2.	Miskin	25,42	21,25	16,25
3.	Kurang sejahtera	55,42	57,08	66,67
4.	Sejahtera	18,33	21,25	17,08

3.3.2 Dinamika Kondisi Rumah Tinggal

Kondisi rumah tinggal rumah tangga Kelompok Afinitas dan bukan terdiri dari kondisi: lantai rumah, kondisi dinding rumah, fasilitas buang air, sumber penerangan rumah, sumber air bersih minum, dan bahan bakar rumah tangga. Pada Tabel 14 terlihat bahwa berkurangnya jumlah rumah tangga yang luas lantainya $\leq 8 \text{ m}^2$ per orang, bertambahnya rumah tangga yang berlantai keramik dan ubin, meningkatnya jumlah rumah tangga yang berdinding tembok, dan berkurangnya berdinding bambu/kayu, meningkatnya kepemilikan WC pribadi dan menurunnya WC alam terbuka, meningkatnya jumlah rumah tangga yang berpenerangan listrik, dan meningkatnya jumlah rumah tangga yang menggunakan air PAM/pengolahan air bersih sebagai sumber air minum.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa secara umum kondisi rumah tinggal rumah tangga kelompok afinitas telah mengalami peningkatan selama program Demapan. Peningkatan cukup signifikan terlihat dari sumber penerangan rumah tangga yang hampir seluruhnya listrik.

Tabel 14. Kondisi Rumah Tinggal Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) dan Bukan Kelompok Afinitas (Bukan-KA) pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Karakteristik	RT-KA		Bukan KA (2015)
		Sebelum Program	2015	
1.	Luas lantai per orang			
	a. $> 8 \text{ m}^2$	90,40	92,10	82,50
	b. $\leq 8 \text{ m}^2$	9,60	7,90	17,50
2.	Jenis lantai			
	a. Keramik	15,80	17,50	16,20
	b. Ubin	62,90	64,60	70,40
	c. Tanah / bambu / kayu.	21,20	17,90	13,30
3.	Jenis dinding			
	a. Tembok	52,50	56,70	58,30
	b. Semi tembok	9,20	7,10	13,80

	c. Bambu / rumbia / kayu	38,30	36,20	27,90
4.	Fasilitas buang air besar			
	a. WC pribadi	87,90	90,40	86,70
	b. WC bersama	3,80	2,50	2,50
	c. Alam terbuka	8,3	7,10	10,80
5.	Sumber penerangan rumah			
	a. Listrik	85,40	95,40	97,50
	b. Non-listrik	14,60	4,60	2,50
6.	Sumber air minum			
	a. Air PAM / Pengolahan Air Bersih	25,80	27,10	23,80
	b. Sumur Pribadi	62,10	61,70	61,20
	c. Sumber mata air bersama	12,10	11,20	15,00
7.	Bahan bakar Rumahtangga			
	a. Gas	47,10	61,70	67,50
	b. Minyak tanah	5,00	3,80	1,70
	c. Kayu bakar, arang	47,90	34,60	30,80

3.3.3 Dinamika Kondisi Sosial Ekonomi

Karakteristik sosial ekonomi rumah tangga Kelompok Afinitas dan Bukan KA dikelompokkan menjadi: konsumsi daging/susu/ayam/ikan, belanja pakaian, makan sehari, pengobatan, penghasilan rumah tangga per bulan, pendidikan kepala keluarga, dan tabungan/kepemilikan barang berharga. Karakteristik sosial ekonomi rumah tangga Kelompok Afinitas dan Bukan KA dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Karakteristik Sosial Ekonomi Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) dan Bukan Kelompok Afinitas (Bukan-KA) pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung , Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Karakteristik	RT-KA		Bukan KA (2015)
		Sebelum Program	2015	
1.	Konsumsi daging/susu/ayam/ikan			
	a. ≥ 3 kali /minggu	22,1	22,5	14,2
	b. 2 kali /minggu	26,7	28,3	27,5
	c. ≤ 1 kali /minggu	51,2	49,2	58,3
2.	Belanja pakaian			
	a. ≥ 1 kali / 3 bulan	12,1	12,1	9,6
	b. ≥ 1 kali / 6 bulan	11,7	12,9	13,8
	c. ≤ 1 kali / tahun	76,2	75,0	76,7
3.	Makan per hari			
	a. 3 kali	74,2	74,6	96,4
	b. 2 kali	9,2	6,2	5,4
	c. 1 kali	16,7	19,2	0,0
4.	Pengobatan			
	a. Dokter/Puskesmas	97,1	96,2	95,8
	b. Pengobatan tradisional	0,8	1,2	2,1
	c. Tidak diobati	2,1	2,5	2,1
5.	Penghasilan Rumahtangga per bulan			
	a. $> Rp 2$ juta	24,6	26,7	16,7

	b. Rp. 1-2 juta	28,3	29,6	51,2
	c. Rp. 500ribu – 1 juta	40,8	37,1	27,1
	d. ≤ Rp. 500 ribu	6,2	6,7	5,0
6.	Pendidikan Kepala Keluarga			
	a. Perguruan Tinggi	2,5	2,9	3,3
	b. SLTA atau sederajat	30,4	31,7	26,7
	c. SLTP atau sederajat	19,2	19,2	29,2
	d. Sekolah Dasar	5,0	40,8	32,5
	e. Tidak sekolah	0,04	5,0	8,3
7.	Tabungan/Kepemilikan barang berharga			
	a. ≥ Rp. 5 juta	20,8	24,6	25,8
	b. Rp. 2-5 juta	13,8	13,3	9,6
	c. Rp. 1-2 juta	15,4	13,8	15,8
	d. < Rp 1 juta	50	48,3	48,8

Karakteristik sosial ekonomi RT-KA relatif sama dengan RT-Bukan KA. Pada RT selama program ada peningkatan. Untuk konsumsi daging/susu/ayam/ikan, belanja pakaian, makan sehari dan pendidikan kepala keluarga peningkatannya lebih sedikit dibandingkan peningkatan tabungan/kepemilikan barang berharga dan penghasilan rumah tangga per bulan.

Dalam hal penghasilan rumah tangga per bulan, terjadi penurunan jumlah rumah tangga pada kelompok penghasilan rendah dan bergeser pada bertambahnya jumlah rumah tangga pada kelompok penghasilan di atasnya. Demikian juga untuk kepemilikan tabungan/barang berharga, kelompok rumah tangga yang tidak memiliki tabungan berkurang dan dibarengi dengan bertambahnya rumah tangga yang memiliki tabungan penghasilan di atasnya. Keadaan ini selain terkait dengan program Demapan juga terkait dengan program listrikisasi dari pemerintah. Berarti dapat dikatakan bahwa program Demapan memiliki dampak terhadap proporsi peningkatan tempat tinggal rumah tangga miskin. Jika diperhatikan lebih lanjut pada Tabel 14, ternyata kondisi rumah tinggal anggota KA relatif sedikit lebih baik daripada bukan KA. Berarti dapat dikatakan bahwa program demapan memiliki dampak terhadap peningkatan sosial ekonomi rumah tangga KA.

3.4 Dinamika Pola Pikir dan Dampak Program Demapan

3.4.1 Kinerja dan Dampak Pola Pikir (KA)

Pola pikir adalah asumsi, cara atau notasi seseorang atau kelompok orang dalam menghargai atau menerima sesuatu hal sehingga dengan rela mengadopsinya atau menerimanya sebagai sesuatu pilihan (Wikipedia). Program Demapan juga dimaksudkan untuk mengubah pola pikir masyarakat sehingga menjadi lebih maju.

Seluruh desa pelaksana Program Demapan di Provinsi Lampung telah berada pada tahap kemandirian, bahkan pasca kemandirian. Menurut pedoman umum kegiatan Demapan menuju gerakan kemandirian pangan (Kementerian Pertanian, 2011), pada tahap kemandirian pola pikir masyarakat lebih maju dan mulai menyadari pentingnya ketahanan pangan rumah tangga dari aspek ekonomi dan sosial budaya, yang ditandai adanya perubahan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman serta berfungsinya cadangan pangan masyarakat. Proporsi Rumah Tangga Kelompok Afinitas (RT-KA) menurut Dinamika Pola Pikir pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Proporsi Rumahtangga Kelompok Afinitas (RT-KA) menurut Dinamika Pola Pikir pada Program Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program dan 2015 (%)

No	Pola Pikir	Sebelum Program	2015
1.	Eksistensi pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok	43,3	35,0
2.	Eksistensi pemahaman dan aplikasi teknologi dalam usaha produktif	10,4	25,4
3.	Eksistensi pemahaman dan kepemilikan tabungan di kelompok atau di Bank	35,4	44,2
4.	Kapasitas/kepercayaan diri dan aktualisasinya dalam tindakan produktif	24,6	35,8
5.	Kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidik bagi anak-anak/keluarga	40,8	61,2
6.	Pemahaman aspek gender dan mendorong peran wanita dalam kegiatan produktif	21,2	34,6
7.	Pemahaman aspek kewirausahaan dan menerapkannya dalam usaha produktif	32,9	44,6
8.	Pemahaman substansi bantuan permodalan Demapan	27,1	61,2
9.	Pemahaman substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat	14,6	17,1
10.	Eksistensi dampak positif pemahaman dan penerapan pola pikir		
	a. Ketersediaan pangan keluarga	10,8	18,3
	b. Distribusi dan pemasaran pangan	22,9	10,0
	c. Konsumsi dan akses pangan	5,8	8,8
	d. Pengurangan rawan pangan	14,6	19,6
	e. Pengurangan kemiskinan	26,7	49,6

Dari Tabel 16 terlihat bahwa terdapat sembilan aspek pola pikir yang dievaluasi terkait Program Demapan, berarti diharapkan dengan Program Demapan, sembilan aspek pola pikir masyarakat tersebut meningkat atau membaik. Apabila diperhatikan dari nilai proporsi pola

pikir rumah tangga kelompok afinitas (RT-KA) seperti yang terlihat pada Tabel 16 menunjukkan bahwa secara umum pola pikir masyarakat pada sembilan aspek belum berada pada nilai yang baik mengingat nilai proporsinya sebagian besar masih di bawah 60 persen, bahkan di bawah 50 persen. Pada kondisi awal program nilai eksistensi pola pikir tertinggi ada pada aspek yang pertama yaitu pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok (43,3). Tingginya aspek tersebut dapat dimengerti karena pada awal program sosialisasi tentang kelompok tentu saja masih menjadi prioritas pembinaan sehingga mengakibatkan relatif tingginya nilai eksistensi aspek tersebut dibandingkan dengan aspek yang lain. Eksistensi terendah pada awal program ada pada aspek yang ke dua yaitu pemahaman dan aplikasi teknologi dalam usaha produktif (10,4). Hal inipun dapat dimengerti mengingat pada awal program pada umumnya aspek teknologi belum menjadi fokus pembinaan, selain hal tersebut apabila ada inovasi teknologi untuk sampai pada tahap aplikasi jelas memerlukan tahapan waktu tertentu.

Eksistensi pola pikir pada tahun 2015 secara umum lebih baik daripada awal program, ada dua aspek pola pikir yang memiliki nilai di atas 60 persen yaitu pada aspek ke lima yaitu Kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidikan bagi anak-anak/keluarga serta aspek ke delapan yaitu Pemahaman substansi bantuan permodalan Demapan. Satu aspek pola pikir justru mengalami penurunan yaitu aspek yang pertama (pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok), penurunan ini kemungkinan disebabkan oleh karena pada tahun 2015 tahapan program sudah mencapai kemandirian atau pasca kemandirian dimana pada tahap tersebut pendampingan sudah sangat berkurang yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan kelompok juga berkurang yang akhirnya berdampak pada penurunan pola pikir tentang aktualisasi kegiatan kelompok.

Perubahan pola pikir masyarakat diharapkan memiliki dampak positif terhadap beberapa aspek kehidupan masyarakat seperti yang terlihat pada Tabel 16. Dampak positif pola pikir terhadap lima aspek kehidupan masyarakat benar dirasakan oleh masyarakat, proporsi masyarakat yang merasakan dampak berkisar antara 5,8 persen sampai dengan 26,7 persen pada awal program, meningkat pada tahun 2015 yaitu pada kisaran 8,8 persen sampai dengan 49,6 persen. Baik pada awal program maupun tahun 2015 dampak positif terbesar dirasakan pada pengurangan kemiskinan di masyarakat. Hal ini terjadi oleh karena bantuan permodalan yang diterima anggota KA pada umumnya digunakan untuk kegiatan produktif yang dapat meningkatkan pendapatan. Peningkatan pendapatan belum tentu dibarengi dengan perbaikan konsumsi pangan mengingat masih cukup banyak keperluan nonpangan yang harus dipenuhi oleh anggota KA.

3.4.2 Eksistensi dan Dampak Program Demapan (Bukan KA)

Program Demapan diharapkan mempunyai dampak positif terhadap masyarakat lain yang belum menjadi anggota KA. Eksistensi pengaruh positif dan dampak Demapan terhadap rumah tangga bukan anggota KA dapat dilihat pada Tabel 17.

Program Demapan ternyata belum terdeseminasi dengan baik kepada masyarakat desa secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya 25,8 persen masyarakat non anggota KA mengetahui eksistensi Demapan di desanya. Nilai pengetahuan ini ternyata lebih rendah daripada hasil evaluasi Demapan di Provinsi Lampung tahun 2012 yang mendapatkan nilai tersebut 44 persen (Nawansih et al., 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Demapan pada tahun-tahun terakhir tidak semakin membaik akan tetapi justru memburuk. Kenyataan ini kemungkinan terjadi oleh karena mekanisme pelaksanaan Demapan di tahun-tahun terakhir berbeda dengan pada awal peluncuran program.

Dari penelitian yang dilakukan diperoleh informasi bahwa hanya satu kali dilaksanakan kegiatan pelatihan di awal program yang hanya diikuti oleh satu orang wakil dari desa, diselenggarakan di tingkat kabupaten. Selain itu di tingkat desa tidak dilaksanakan pelatihan atau sosialisasi program, hal ini berbeda dengan kegiatan Demapan pada awal peluncuran (tahun 2006/2007) yang secara cukup intensif melaksanakan pelatihan di tingkat desa.

Tabel 17. Eksistensi Pengaruh Positif dan Dampak Demapan Terhadap Rumahtangga Bukan KA di Provinsi Lampung, 2015 (%)

No	Uraian	2015
1.	Pengetahuan tentang eksistensi Demapan	25,8
2.	Sumber informasi Demapan	
	a. Anggota KA	15,0
	b. PPL	0,0
	c. Aparat desa	10,8
3.	Pengetahuan keberadaan kelembagaan Demapan	12,9
	a. Kelompok Afinitas	11,7
	b. Lembaga Keuangan Desa	1,2
	c. Tim Pangan Desa	0,0
4.	Persepsi pengaruh positif Demapan terhadap	
	a. Hidup berkelompok	2,5
	b. Adopsi teknologi budidaya	20,83
	c. Usaha pengolahan komoditas pangan	0,42
	d. Usaha perkebunan	0,0
	e. Usaha peternakan	0,8

	f. Usaha perikanan.	0,0
5.	Persepsi tentang dampak positif Demapan terhadap	
	a. Ketersediaan pangan keluarga	3,3
	b. Distribusi dan pemasaran pangan	0,0
	c. Konsumsi dan akses pangan	1,2
	d. Pengurangan rawan pangan	2,9
	e. Pengurangan kemiskinan	29,1
	f. Perubahan pola pikir keluarga	16,7

Dari Tabel 17 terlihat bahwa sumber informasi masyarakat non anggota KA mengenai keberadaan Demapan adalah dari anggota KA dan aparat desa, dimana yang anggota KA lebih besar daripada aparat desa. Hal ini menunjukkan bahwa Program Demapan hanya terdeseminasi secara alami dari mulut ke mulut masyarakat artinya tidak ada upaya khusus pemangku kepentingan (aparat desa dan PPL) untuk mensosialisasikan kepada masyarakat umum di desa. Suatu ironi ditemukan dari hasil penelitian ini dimana PPL yang dalam hal ini juga sebagai pendamping Demapan sama sekali tidak menjadi sumber informasi tentang Demapan bagi masyarakat desa umumnya. Kenyataan ini mengindikasikan bahwa kinerja pendamping Demapan tidak optimal.

Di antara kelembagaan Demapan yang ada, ternyata KA adalah lembaga yang paling banyak diketahui oleh masyarakat umum di desa. Hal ini dapat dimengerti karena sejalan dengan sumber informasinya dimana non anggota KA mendapat informasi tentang Demapan dari anggota KA.

Selain KA, ternyata LKD meskipun dalam jumlah kecil juga dikenal oleh masyarakat umum (non anggota KA). Lembaga Keuangan Desa dikenal oleh masyarakat umum karena berkaitan dengan fungsi dari LKD sebagai pengelola dana bantuan, hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan Demapan yang diketahui oleh masyarakat umum hanyalah yang berkaitan dengan bantuan permodalan.

Tim Pangan Desa yang merupakan lembaga sentral pengelola Program demapan ternyata justru tidak dikenal oleh masyarakat. Tidak dikenalnya TPD ini juga menunjukkan bahwa lembaga ini tidak memiliki eksistensi, hal ini juga mengindikasikan bahwa TPD tidak melaksanakan fungsinya sebagai perencana dan penggerak program seperti yang ditetapkan dalam Pedoman Operasional Program Aksi Desa Mandiri Pangan tahun 2008 (Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian, 2008). Dengan tidak adanya fungsi perencanaan dan penggerakan jelas bahwa efektivitas dan efisiensi program yang baik tidak akan didapatkan.

Di antara masyarakat desa nonanggota KA yang mengetahui Program Demapan memiliki persepsi bahwa Demapan memiliki pengaruh positif terhadap beberapa bidang kehidupan. Dari beberapa bidang kehidupan yang ada seperti yang dicantumkan pada Tabel

17, ternyata pengaruh terbesar adalah pada adopsi teknologi budidaya. Teknologi budidaya merupakan suatu pengetahuan yang mudah ditransfer dari individu ke individu lainnya karena langsung bersentuhan dengan kebutuhan individu tersebut dalam hal ini petani. Sehubungan dengan hal tersebut dapat dimengerti apabila pengaruh terhadap adopsi teknologi budidaya inilah yang dirasakan oleh masyarakat nonanggota KA.

Sejalan dengan pengaruh positif terhadap adopsi teknologi budidaya yang telah diuraikan, masyarakat nonanggota KA memiliki persepsi bahwa Demapan memiliki dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Persepsi tentang dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan ini adalah yang terbesar dibandingkan dengan dampak terhadap yang lainnya (Tabel 17). Persepsi yang lain yang cukup terlihat adalah adanya dampak terhadap perubahan pola pikir keluarga, hal ini tentu juga merupakan nilai positif dari Program Demapan.

3.5. Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan

Program demapan pada dasarnya adalah program pemberdayaan masyarakat, pada program ini kegiatan pendampingan memegang peran yang sangat penting. Mengingat pentingnya peran pendampingan maka perlu kajian khusus terhadap aspek pendampingan ini karena dengan berjalannya waktu tentu akan terjadi dinamika dalam kegiatan ini. Data dinamika kegiatan pendampingan Program Demapan hasil penelitian dapat dilihat pada Tabel 18.

Pendamping jelas merupakan unsur utama pada kegiatan pendampingan, dikenalnya pendamping oleh subyek pendampingan (kelompok yang didampingi) tentu merupakan hal yang sangat penting. Dari Tabel 18 terlihat bahwa pendamping cukup dikenal oleh anggota KA yaitu sebanyak 87,5 persen dan 77,9 persen masing-masing pada awal program dan tahun 2015. Sebagian kecil anggota KA tidak mengenal pendamping kemungkinan disebabkan karena anggota tersebut tidak aktif mengikuti kegiatan Demapan. Apabila dibandingkan antara awal program dengan tahun 2015 ternyata terjadi penurunan jumlah anggota yang mengenal pendamping, hal ini disebabkan di sebagian Demapan terjadi pergantian pendamping karena perpindahan tugas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa frekuensi pertemuan pendamping dengan anggota yang terbanyak adalah satu kali sebulan, masing-masing sebanyak 37,5 persen dan 32,5 persen pada awal program dan tahun 2015 (Tabel 18). Dari Tabel 18 juga terlihat penurunan frekuensi pertemuan antara pendamping dengan anggota KA, penurunan tersebut terlihat dari peningkatan persentase pertemuan lebih satu bulan sekali (26,7 pada awal program menjadi 30,4 tahun 2015) dan penurunan persentase dari pertemuan yang frekuensinya lebih sering.

Hal ini terjadi karena semakin lama kegiatan berjalan maka antusiasme para pelaksana program berkurang.

Sejalan dengan menurunnya frekuensi pertemuan dengan pendamping, maka materi yang disampaikan pendamping juga berkurang. Hampir seluruh materi berkurang pemberiannya apabila dibandingkan antara awal program dan tahun 2015, pengecualian ada pada substansi keuangan mikro yang sedikit ada peningkatan. Kemungkinan hal tersebut terjadi sesuai dengan tuntutan kebutuhan, substansi keuangan mikro sangat diperlukan oleh Demapan tahap kemandirian karena tahun selanjutnya pada tahap pasca kemandirian sudah dilepas oleh pendamping sehingga lembaga keuangan mikro yang ada sudah cukup mandiri.

Tabel 18. Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015 (%)

No	Uraian	Periode Program	2015
1.	Eksistensi kenal dengan pendamping kegiatan Demapan	87,5	77,9
2.	Frekuensi bertemu dengan pendamping		
	a. ≥ 4 kali sebulan	7,1	2,5
	b. 3 kali sebulan	7,9	5
	c. 2 kali sebulan	8,3	7,5
	d. 1 kali sebulan	37,5	32,5
	e. Lebih dari 1 bulan sekali	26,7	30,4
3.	Materi pendampingan		
	a. Administrasi	42,9	34,6
	b. Budidaya	42,5	35,0
	c. Kerajinan	13,3	12,9
	d. Pengolahan hasil	22,1	17,9
	e. Keuangan Mikro	18,7	20,8
	f. Pemasaran	11,2	9,6
	g. Lainnya	4,2	5,4
4.	Penguasaan materi oleh pendamping		
	a. Administrasi	41,7	32,5
	b. Budidaya	53,7	47,5
	c. Kerajinan	5,8	7,1
	d. Pengolahan hasil	22,5	18,3
	e. Keuangan Mikro	19,2	20,8
	f. Pemasaran	10,8	8,7
	g. Lainnya	3,7	5,8
5.	Karakter komunikasi pendamping		
	a. Sangat Komunikatif	59,6	50,0
	b. Komunikatif	40,4	50,0
	c. Kurang Komunikatif	0,0	0,0
6.	Eksistensi pendamping		
	a. Sangat diperlukan	61,2	69,2

b. Diperlukan	37,1	30,0
c. Kurang diperlukan	16,7	0,8

Menurut penilaian anggota, penguasaan pendamping terhadap berbagai bidang cukup bervariasi, penguasaan terbaik ada pada aspek budidaya. Penguasaan terhadap aspek budidaya oleh pendamping relatif lebih baik dibandingkan aspek lainnya dapat dimengerti karena pendamping Demapan adalah PPL dimana tentu saja kompetensinya memang dalam aspek budidaya. Penguasaan materi tersebut juga mengalami penurunan antara awal program dan tahun 2015, hal ini kemungkinan berkaitan dengan frekuensi pembinaan yang dilakukan, oleh karena frekuensi pembinaan menurun maka dinilai kemampuan pendamping juga menurun.

Dalam hal karakter komunikasi, dari hasil penelitian diketahui bahwa pada tidak ditemukan pendamping yang tidak komunikatif, karakter sangat komunikatif relatif lebih besar dibandingkan dengan karakter komunikatif. Apabila dibandingkan antara awal program dengan tahun 2015 tidak terlihat perbedaan yang signifikan dalam hal karakter komunikasi pendamping.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendamping ternyata sangat diperlukan pada kegiatan-kegiatan pada Program Demapan, hal ini ditemukan baik pada awal program maupun tahun 2015 (Tabel 18). Terjadi peningkatan eksistensi pendamping untuk tahun 2015 yaitu 69,2 persen anggota menyatakan pendamping sangat diperlukan, meningkat dari awal program yaitu 61,2 persen. Peningkatan ini terjadi diduga karena di tahun 2015 terjadi penurunan kegiatan oleh pendamping sehingga anggota merasakan perlunya kehadiran pendamping.

3.6 Kinerja Program Demapan dan Kemandirian Ekonomi Desa

3.6.1 Kinerja Ketahanan Pangan dan Rawan Pangan

Keragaan ketersediaan pangan rumah tangga miskin tingkat desa Demapan status mandiri dapat dilihat pada Tabel 19.

Terkait dengan produksi pangan pokok, dari Tabel 19 terlihat bahwa produksi pangan pokok pada tahun 2015 dibandingkan awal kegiatan terjadi sedikit kenaikan terutama beras. Kenaikan produksi umumnya kurang dari 10, dan menurut mereka produksi lebih disebabkan oleh faktor iklim serta kombinasi antara program demapan dengan iklim. Pada beberapa desa yang menjadi sampel, dana pinjaman digunakan oleh kelompok sebagai dana talangan yang dikelola kelompok untuk pengadaan pupuk atau kebutuhan lain dan tidak dipinjamkan berupa uang. Hal ini sangat baik dijadikan contoh mengingat kalau diberikan pinjaman berupa uang

kadang-kadang untuk kebutuhan yang lain. Dari kajian yang dilakukan ditemukan beberapa desa yang merupakan wilayah perkebunan seperti Tanggamus dan Lampung Barat sehingga banyak RT miskin yang tidak mempunyai lahan tanaman pangan. Namun mereka mendapatkan penghasilan dari tanaman perkebunan, pisang atau lainnya yang digunakan untuk membeli pangan pokok. Pada RT miskin yang dikaji, pendapatan sektor pertanian masih mendominasi total pendapatan rumah tangga miskin (66) pada awal program dan menurun menjadi 53 pada tahun 2015.

Dalam hal ketersediaan pangan Rumah Tangga (RT) miskin terlihat sedikit peningkatan persentasi (2) RT miskin yang ketersediaan panganya melebihi kebutuhan konsumsi serta terjadi sedikit penurunan persentase (2) RT miskin yang ketersediaan panganya kurang dari kebutuhan konsumsinya. Sebagian besar (48) RT miskin mempunyai ketersediaan pangan mencukupi kebutuhan dan hanya sebagian kecil (13-15) mempunyai ketersediaan pangan melebihi kebutuhan konsumsi dan masih cukup banyak RT miskin (38) yang ketersediaan panganya kurang dari kebutuhan konsumsi. Hal ini juga tercermin dari hanya sekitar 17 RT miskin yang mempunyai cadangan pangan untuk satu bulan yang akan datang.

Hal ini menunjukkan ada pertumbuhan pendapatan di luar sektor pertanian, diduga karena lahan yang tidak bertambah sementara jumlah KK terus bertambah sehingga RT miskin mencari peluang lain misalnya sebagai tukang bangunan, berdagang dan lainnya. Apabila dikaitkan dengan pemanfaatan pekarangan, program Demapan terlihat memiliki dampak terhadap ketersediaan pangan. Dari Tabel 19 terlihat bahwa rumah tangga miskin yang memanfaatkan pekarangannya terutama untuk mencukupi kebutuhan konsumsi (53-56) dan mendukung ketersediaan pangan (12), sedangkan sebagai tambahan pendapatan keluarga sebesar 12-14. Pola sebelum program dibandingkan tahun 2015 tidak banyak berubah. Umumnya tanaman pangan yang ditanam di pekarangan adalah buah-buahan, sayur-sayuran dan tanaman coklat.

Tabel 19. Keragaan Ketersediaan Pangan Rumahtangga Miskin Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015

No	Aspek Ketersediaan Pangan	Awal Program	2015
1.	Rataan produksi pangan pokok desa (Kg/Tahun)	8982,34	9448,59
	a. Beras	4825,78	5289,84
	b. Jagung	756,25	756,25
	c. Singkong/ubi kayu	2462,81	2465
	d. Ubi jalar	937,5	937,5
	e. Talas	0	0
	f. Sagu	0	0

No	Aspek Ketersediaan Pangan	Awal Program	2015
2.	Proporsi Rumah tangga miskin terkait produksi pangan pokok (%)		
	a. Produksi pangan pokok > Rata-rata produksi desa	38,13	26,69
	b. Produksi pangan pokok = Rata-rata produksi desa	48,13	58,94
	c. Produksi pangan pokok < Rata-rata produksi desa	7,81	8,13
3.	Proporsi Rumah tangga miskin yang produksi pangan pokoknya meningkat (%)	14,06	20,69
4.	Peningkatan produksi pangan pokok (/tahun)		
	a. < 10	43,75	50
	b. 10-25	18,75	25
	c. >25	12,5	6,25
5.	Persepsi terhadap penyebab peningkatan produksi (%)		
	a. Program Demapan	0,00	0,00
	b. Program Pemerintah Lainnya	0,00	0,00
	c. Faktor Iklim	31,25	37,5
	d. Kombinasi 1 dan 2	0,00	6,25
	e. Kombinasi 1 dan 3	31,25	37,5
	f. Kombinasi 2 dan 3	6,25	0,00
	g. Kombinasi 1, 2 dan 3	0,00	0,00
6.	Proporsi Rumah tangga miskin terkait ketersediaan pangannya (%)		
	a. Ketersediaan pangan > Kebutuhan konsumsi	13,75	15,63
	b. Ketersediaan pangan = Kebutuhan konsumsi	48,44	48,75
	c. Ketersediaan pangan < Kebutuhan konsumsi	37,81	35,63
7.	Proporsi Rumah tangga miskin yang menyiapkan cadangan pangan di Rumah tangga untuk kebutuhan 1 bulan yang akan datang (%)	17,19	17,81
8.	Proporsi pendapatan sektor pertanian Rumah tangga miskin terhadap total pendapatan RT miskin (%)	66,14	52,51
9.	Persepsi terhadap fungsi pendapatan non-pertanian Rumah tangga miskin (%)		
	a. Pelengkap pengeluaran untuk pangan	18,75	18,75
	b. Mencukupi pengeluaran untuk pangan	25	25

Tabel 19. Lanjutan

No	Aspek Ketersediaan Pangan	Awal Program	2015
	c. Melebihi pengeluaran untuk pangan	6,25	0,00
10	Proporsi RT miskin terkait pemanfaatan pekarangan rumah (%)		
	a. Mendukung ketersediaan pangan keluarga	12,5	11,88
	b. Mendukung kebutuhan konsumsi keluarga	53,13	56,13
	c. Sumber tambahan pendapatan keluarga	12,5	13,75
	d. Usaha tanaman obat-obatan	8,75	8,75
	e. Berperan ganda/ multi-fungsi (ketersediaan/ konsumsi pangan, sumber pendapatan, dan lain-lain)	14,69	16,06

Keragaan distribusi pangan rumah tangga miskin tingkat desa sebelum dan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 20. Dari hasil kajian diketahui bahwa dalam hal distribusi pangan di RT miskin tidak ada masalah, pangan selalu tersedia di warung/kios di desa. Dalam hal daya beli rumah tangga, terlihat sekitar 22 persen rumah tangga tidak mampu menjangkau harga pangan, namun tahun 2015 proporsi tersebut telah menurun menjadi 19 persen. Sebanyak 18 RT miskin tidak bisa menjangkau pangan disebabkan tidak mempunyai uang.

Akses terhadap pangan dari masyarakat cukup baik. Selain pangan selalu tersedia di kios/warung, masyarakat juga mudah mendapatkan pangan di pasar karena pasar menyediakan berbagai jenis pangan dan jarak tempat tinggal dengan pasar terdekat rata-rata hanya 3,13 km. Keragaan konsumsi pangan rumah tangga miskin Demapan Status Mandiri di Propinsi Lampung digambarkan dengan proporsi rumah tangga miskin dengan pola konsumsi B3A, frekuensi makan, volume makan, jenis pangan pokok yang dikonsumsi serta eksistensi pangan lokal. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 21, secara keseluruhan kondisi keragaan konsumsi pangan setelah program sedikit lebih baik dibandingkan sebelum program demapan pada beberapa hal seperti terdapat peningkatan proporsi rumah tangga miskin yang mengkonsumsi pangan B3A, frekuensi makan dan volume makan yang cukup.

Tabel 20. Keragaan Distribusi Pangan Rumah tangga Miskin Tingkat Desa Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015

No	Aspek Distribusi	Awal Program	2015
1.	Eksistensi ketersediaan pangan pokok di warung/kios di desa (%)		
	a. Selalu	87,5	87,5
	b. Kadang-kadang	6,25	6,25
	c. Tidak ada	6,25	6,25
2.	Eksistensi akses ekonomi pangan (%) (keterjangkauan kerja)	100	93,75
3.	Proporsi RT miskin yang tidak bisa menjangkau harga pangan pokok (%)	22,19	19,18
4.	Penyebab tidak terjangkau harga pangan (%)		
	a. Harga mahal	25	25
	b. Tidak mempunyai uang	62,5	68,75
5.	Proporsi RT miskin yang tidak bisa menjangkau harga pangan pokok karena tidak mempunyai uang (%)	16,88	16,38
6.	Jarak ke pasar terdekat (km)	3,13	3,13
7.	Keterkaitan pembangunan pasar dengan Program Demapan (%)	0,00	0,00
8.	Jenis komoditas yang dijual di pasar (%)		

	a. Pasar hanya menjual padi/beras saja	0,00	0,00
	b. Pasar menjual produk-produk tanaman pangan	31,25	31,25
	c. Pasar menjual beberapa komoditas pertanian	68,75	68,75
9.	Eksistensi penjualan/pemasaran hasil pertanian (%)	59,36	55,94
10.	Cara pemasaran hasil pertanian (%)		
	a. Dilakukan sendiri	79,06	75,63
	b. Sebagian dipasarkan bersama KA	10,31	11,25
	c. Seluruhnya dipasarkan bersama KA	11,25	8,75

Sedangkan pola makanan pokok RT miskin tidak ada perubahan, 100 adalah nasi, sedangkan pangan lokal yang dihasilkan dari pekarangan berupa buah dan sayur umumnya adalah sebagai tambahan/pelengkap untuk dikonsumsi sendiri dan ada yang sebagian dijual. Masih sangat minim pangan lokal yang diolah, padahal dengan cara mengolah kemudian menjualnya akan ada nilai tambah dan penghasilan tambahan bagi ibu-ibu di Desa tersebut.

Tabel 21. Keragaan Konsumsi Pangan Rumah tangga Miskin Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015 (%)

No	Aspek Konsumsi	Awal Program	2015
1.	Proporsi RT miskin yang telah mengkonsumsi makanan beragam, bergizi, berimbang dan aman	41,06	48,31
2.	Proporsi RT miskin terkait frekuensi makan(%)		
	a. 1 kali sehari	1,56	0,94
	b. 2 kali sehari	16,88	12,88
	c. 3 kali sehari	82,19	87,13
3.	Proporsi RT miskin terkait volume makan setiap kali makan (%)		
	a. Volume makan kurang	6,88	1,25
	b. Volume makan cukup	79,69	82,19
	c. Volume makan lebih dari cukup	18,44	16,56
4.	Proporsi RT miskin terkait dengan jenis pangan pokok		
	a. Pangan pokok beras	100	100
	b. Pangan pokok jagung	0	0
	c. Pangan pokok singkong/ubi kayu	0	0
	d. Pangan pokok talas	0	0
	e. Pangan pokok sagu	0	0
	f. Pangan pokok campuran	0	0
5.	Proporsi RT miskin terkait dengan eksistensi pangan lokal		
	a. Pangan lokal hanya untuk dikonsumsi	61,25	62,18

b. Dikonsumsi dan sebagian dijual	25	22,81
c. Dikonsumsi dan sebagian diolah lalu dijual	5,31	5,94
d. Diolah tetapi belum didukung mesin pengolah	0	0
e. Diolah dengan mesin, tetapi pemasaran belum lancar	0	0
f. Diolah dengan mesin dan pemasaran cukup lancar	0	0

Nampaknya potensi tersebut belum berkembang karena belum ada pendamping yang mempunyai keahlian tersebut dan melakukan pembinaan secara intensif. Keragaan rawan pangan RT miskin tingkat Demapan status mandiri pada tahun 2015 secara umum sedikit membaik dibandingkan awal program. Hal ini didukung sedikit menurunnya proporsi RT miskin yang dalam setahun mengalami kekurangan bahan pangan pokok dari 20 menjadi 18 serta persepsi penyebab kekurangan pangan pokok akibat tidak mempunyai uang menurun dari 12,5 menjadi 11.

Tabel 22. Keragaan Rawan Pangan Rumah tangga Miskin Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Awal Program dan 2015 (%)

No	Aspek Rawan Pangan	Awal Program	2015
1.	Proporsi RT miskin yang dalam setahun mengalami kekurangan bahan makanan pokok	20,40	17,90
2.	Persepsi penyebab kekurangan pangan pokok		
	a. Tidak mempunyai uang	12,50	10,80
	b. Gagal panen	5,00	4,60
	c. Bencana alam	0	0
	d. Lainnya	2,90	2,50
3.	Proporsi balita yang beratnya di bawah standar kesehatan	1,20	1,70
4.	Proporsi balita/ibu hamil/ibu menyusui yang malnutrisi	0	0

Aspek kerawanan pangan rumah tangga miskin juga dapat dilihat dari proporsi balita yang beratnya di bawah standar kesehatan serta proporsi balita/ibu hamil/ibu menyusui yang malnutrisi, keduanya proporsinya sangat kecil 0-1,7. Kondisi ini menggambarkan bahwa ada dampak positif demapan dalam upaya mengurangi kerawanan pangan di desa miskin dan kondisi tersebut menunjukkan belum ada indikasi terjadinya kerawanan pangan.

3.6.2 Dinamika Indikator Kemiskinan Perdesaan

Dinamika proporsi rumah tangga miskin terkait dengan 14 indikator kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 23. Dari berbagai indikator kemiskinan, program Demapan mempunyai dampak positif relative kecil terhadap peningkatan kondisi rumah baik luasan, lantai, dinding

maupun WC. Program pemerintah lainnya untuk pemasangan listrik dan penggunaan gas LPG sebagai bahan bakar rumah tangga walaupun tidak terkait dengan program Demapan namun dirasakan cukup nyata meningkatkan kehidupan RT miskin.

Dalam hal konsumsi protein hewani dan belanja pakaian nyaris tidak ada perubahan. Namun latar belakang pendidikan KK, penghasilan dan kepemilikan tabungan ada peningkatan walaupun sangat kecil.

Tabel 23. Dinamika Proporsi Rumahtangga Miskin Terkait Dengan 14 Indikator Kemiskinan Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Sebelum Program Demapan dan 2015 (%)

No	Indikator Kemiskinan	Sebelum Program	2015
1.	Proporsi Rumahtangga miskin yang luas lantai per orang		
	a. > 8 m ²	90,40	92,10
	b. ≤ 8 m ²	9,60	7,90
2.	Proporsi Rumahtangga miskin yang jenis lantai		
	a. Keramik	15,80	17,50
	b. Ubin	62,90	64,60
	c. tanah / bambu / kayu	21,20	17,90
3.	Proporsi Rumahtangga miskin yang jenis dinding		
	a. tembok	52,50	56,70
	b. semi tembok	9,20	7,10
4.	Proporsi Rumahtangga miskin yang jenis dinding		
	c. bambu / rumbia / kayu	38,30	36,20
	Proporsi Rumahtangga miskin yang asilitas buang air besar		
	a. WC pribadi	87,90	90,40
	b. WC bersama	3,80	2,50
5.	Proporsi Rumahtangga miskin yang sumber penerangan rumah ()		
	a. Listrik	85,40	95,40
	b. non-listrik	14,60	4,60
6.	Proporsi Rumahtangga miskin yang sumber air minum		
	a. Air PAM / Pengolahan Air Bersih	25,80	27,10
	b. Sumur Pribadi	62,10	61,70
	c. Sumber mata air bersama	12,10	11,20
7.	Proporsi Rumahtangga miskin yang bahan bakar rumah tangga		
	a. Gas	47,10	61,70
	b. Minyak tanah	5,00	3,80
	c. Kayu bakar, arang	47,90	34,60
8.	Proporsi Rumahtangga miskin yang konsumsi daging/ susu/ ayam/ikan		
	a. ≥ 3 kali /minggu	22,10	22,50
	b. 2 kali /minggu	26,70	28,30

No	Indikator Kemiskinan	Sebelum Program	2015
	c. ≤ 1 kali /minggu	51,20	49,20
9.	Proporsi Rumahtangga miskin yang belanja pakaian		
	a. 1 kali / 3 bulan	12,10	12,10
	b. ≥ 1 kali / 6 bulan	11,70	12,90
	c. ≤ 1 kali / tahun	76,20	75,00
10.	Proporsi Rumahtangga miskin yang makan per hari		

Tabel 23. Lanjutan

No	Indikator Kemiskinan	Sebelum Program	2015
	a. 3 kali	74,20	74,60
	b. 2 kali	9,20	6,20
	c. 1 kali	16,70	19,20
11.	Proporsi Rumahtangga miskin yang pengobatan		
	a. Dokter/Puskesmas	97,10	96,20
	b. Pengobatan tradisional	0,80	1,20
	c. Tidak diobati	2,10	2,50
12.	Proporsi Rumahtangga miskin yang penghasilan Rumahtangga per bulan		
	a. $> \text{Rp } 2$ juta	24,60	26,70
	b. Rp. 1-2 juta	28,30	29,60
	c. Rp. 500ribu – 1 juta	40,80	37,10
	d. $\leq \text{Rp. } 500$ ribu	6,20	6,70
13.	Berapa proporsi Rumahtangga miskin yang pendidikan Kepala Keluarga		
	a. Perguruan Tinggi	2,50	2,90
	b. SLTA atau sederajat	30,40	31,0
	c. SLTP atau sederajat	19,20	19,20
	d. Sekolah Dasar	42,50	40,80
	e. Tidak sekolah	5,40	5,40
14.	Berapa proporsi Rumahtangga miskin yang tabungan/ Kepemilikan barang berharga		
14.	Berapa proporsi Rumahtangga miskin yang tabungan/ Kepemilikan barang berharga		
	a. $\geq \text{Rp. } 5$ juta	20,80	24,60
	b. Rp. 2-5 juta	13,80	13,30
	c. Rp. 1-2 juta	15,40	13,80
	d. $< \text{Rp } 1$ juta	50,00	48,30

3.6.3 Eksistensi dan Dampak Kelembagaan Demapan

Eksistensi dan dampak kelembagaan Demapan di tingkat desa dapat dilihat pada Tabel 24. Eksistensi dan dampak kelembagaan Demapan dapat diketahui dari persepsi dan pengaruh dari kelembagaan demapan seperti kelompok afinitas (K.A), lembaga keuangan desa (LKD), serta tim pangan desa (TPD) terhadap masyarakat.

Tabel 24. Eksistensi dan Dampak Kelembagaan Demapan di Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, 2015 (%)

No	Kinerja Kelembagaan Demapan	2015	U mumnya seluruh masyara kat memiliki persepsi positif terhadap kelompo k afinitas (KA). Ini dapat dilihat dari adanya dampak positif KA yang besar dan menonjol terutama pada kehidupa
A. Kelompok Afinitas (KA)			
1.	Persepsi eksistensi pengaruh KA terhadap masyarakat miskin di desa	93,80	
2.	Persepsi dampak positif KA terhadap		
	a. Hidup berkelompok dan saling kerjasama	81,20	
	b. Adopsi teknologi budidaya	37,50	
	c. Usaha pengolahan komoditas pangan	18,80	
	d. Usaha perkebunan	37,50	
	e. Usaha peternakan	12,50	
	f. Usaha perikanan	0	
	g. Usaha perdagangan	18,80	
	h. Memanfaatkan pekarangan	12,50	
	i. Makanan bergizi	18,80	
	j. Kegiatan untuk ibu hamil dan ibu menyusui	12,50	
	k. Pertemuan rutin/rapat	62,50	
B. Lembaga Keuangan Desa (LKD)			
1.	Persepsi eksistensi pengaruh LKD terhadap masyarakat miskin di desa	93,80	
2.	Persepsi dampak positif LKD terhadap		
	a. Semakin banyak yang menabung	31,20	
	b. Semakin banyak yang meminjam	68,80	
	c. Berkurang yang meminjam ke pelepas uang	75,00	
	d. LKD menjadi lembaga layanan modal masyarakat	37,50	
C. Tim Pangan Desa (TPD)			
1.	Persepsi eksistensi pengaruh TPD terhadap masyarakat miskin di desa	62,50	
2.	Persepsi dampak positif TPD terhadap		
	a. Membantu membuat rencana pembangunan desa	25,00	
	b. Membantu menjalankan program yang masuk ke desa	56,20	
	c. Membantu dalam memaparkan program desa ke luar desa	12,50	
3.	Persepsi dampak positif LKD terhadap		
	a. Banyak yang menabung	31,20	
	b. Semakin banyak yang meminjam	68,80	
	c. Berkurang yang meminjam ke pelepas uang	75,00	

n berkelompok dan kerjasama serta pertemuan rutin. Pengaruh positif yang cukup besar lainnya adalah pada adopsi teknologi budidaya dan teknologi perkebunan. Walaupun kurang besar dampak eksistensi KA juga berpengaruh positif terhadap usaha peternakan, perdagangan, pemanfaatan pekarangan dan lainnya. Bidang yang belum tersentuh dampak eksistensi KA sama sekali adalah usaha perikanan, padahal beberapa desa punya potensi untuk

dikembangkan usaha perikanan tersebut. Nampaknya untuk daerah tersebut perlu dicarikan pendamping yang mempunyai kompetensi bidang perikanan.

Persepsi eksistensi Lembaga Keuangan Desa (LKD) juga sangat besar dan berpengaruh positif terhadap sistem keuangan RT miskin di desa ditunjukkan dengan menurunnya persentase RT miskin yang meminjam ke pelepas uang dan meningkatnya RT miskin yang meminjam ke LKD. Namun dampak positif LKD sebagai lembaga layanan modal serta mendorong RT untuk menabung nampaknya belum optimal. Perlu upaya keras bagi LKD tersebut unjuk menjalankan fungsinya secara optimal.

Eksistensi pengaruh lembaga lain yaitu TPD terhadap masyarakat miskin agak rendah dan berpengaruh positif lebih ke membantu menjalankan program yang masuk ke desa. Pengaruh positif terhadap perencanaan pembangunan desa relative kecil.

3.6.4 Dampak Demapan terhadap Perubahan Pola Pikir

Dampak Demapan terhadap perubahan pola pikir dapat dilihat pada Tabel 25. Pelaksanaan program Demapan di desa selain akan memberikan dampak positif secara fisik kepada masyarakat tetapi diharapkan juga dapat merubah pola pikir masyarakat. Perubahan terbesar (.50) tampak pada pemahaman substansi bantuan permodalan Demapan untuk penguatan modal kelompok, menyadari manfaat pendidikan dan penerapannya dalam keluarga, pemahaman dampak positif terhadap pengurangan kemiskinan. Pengaruh terhadap pola pikir cukup besar (35-50) adalah pemahaman terhadap manfaat tabungan, pemahaman terhadap praktek kewirausahaan, manfaat kegiatan kelompok, kepercayaan diri, serta mendorong partisipasi aktif wanita dalam kegiatan produktif. Sebaliknya pengaruh terkecil adalah perubahan pola pikir yang berdampak pada ketersediaan, distribusi dan pemasaran pangan, konsumsi dan akses pangan, serta pengurangan rawan pangan. Dampak program Demapan terhadap pemahaman substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya rumahtangga / lokal juga tergolong rendah. Padahal bagian ini cukup potensial untuk dikembangkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketersediaan pangan bahkan sebagai usaha produktif.

Tabel 25. Proporsi Rumahtangga Terhadap Perubahan Pola Pikir di Tingkat Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, 2015 (%)

No	Aspek Pola Pikir	2015
1.	Proporsi Rumahtangga miskin yang menyadari manfaat dan ikut aktif dalam kegiatan kelompok	35,00
2.	Proporsi Rumahtangga miskin yang menyadari manfaat dan mengaplikasikan teknologi dalam usaha produktif	25,40

No	Aspek Pola Pikir	2015
3.	Proporsi Rumah tangga miskin yang memahami manfaat dan memiliki tabungan di kelompok/diluar kelompok (Bank)	44,20
4.	Proporsi Rumah tangga miskin yang mengalami peningkatan kepercayaan diri dan menerapkannya dalam kegiatan produktif	35,80
5.	Proporsi Rumah tangga miskin yang menyadari manfaat pendidikan dan menerapkannya dalam pendidikan keluarga/anak-anak	61,20
6.	Proporsi Rumah tangga miskin yang menyadari manfaat pengarusutamaan jender dan mendorong partisipasi aktif wanita dalam kegiatan produktif	34,00
7.	Proporsi Rumah tangga miskin yang memahami praktek kewirausahaan dan menerapkannya dalam akses permodalan dan peningkatan produksi	44,60
8.	Proporsi pemahaman substansi bantuan permodalan Demapan untuk penguatan modal usaha kelompok	61,20
9.	Proporsi pemahaman substansi pengembangan pemberdayaan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan sumberdaya Rumah tangga / lokal	17,10
10.	Proporsi Rumah tangga miskin dengan perubahan pola pikir yang berdampak positif terhadap:	
	a. Ketersediaan pangan keluarga	18,30
	b. Distribusi dan pemasaran pangan	10,00
	c. Konsumsi dan akses pangan	8,80
	d. Pengurangan rawan pangan	19,60
	e. Pengurangan kemiskinan	49,60

3.6.5 Dinamika Pendampingan Program Demapan

Tabel 26. Dinamika Kegiatan Pendampingan Program Demapan di Tingkat Demapan di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015 (%)

No	Uraian	Periode Program	2015
1.	Eksistensi kenal dengan pendamping kegiatan Demapan	87,50	77,90
2.	Frekuensi bertemu dengan pendamping		
	a. ≥ 4 kali sebulan	7,10	2,50
	b. 3 kali sebulan	7,90	5,00
	c. 2 kali sebulan	8,30	7,50
	d. 1 kali sebulan	37,50	32,50
	e. Lebih dari 1 bulan sekali	26,70	30,40
3.	Materi pendampingan		
	a. Administrasi	42,90	34,60
	b. Budidaya	42,50	35,00
	c. Kerajinan	13,30	5,80
	d. Pengolahan hasil	22,10	22,50
	e. Keuangan Mikro	18,80	20,80
	f. Pemasaran	11,20	9,60

	g. Lainnya	4,20	5,40
4.	Penguasaan materi oleh pendamping		
	a. Administrasi	41,70	32,50
	b. Budidaya	53,00	47,50
	c. Kerajinan	5,80	7,10
	d. Pengolahan hasil	22,50	18,30
	e. Keuangan Mikro	19,20	20,80
	f. Pemasaran	10,80	8,80
	g. Lainnya	3,80	5,80
5.	Karakter komuniiasi pendamping		
	a. Sangat Komunikatif	59,60	40,80
	b. Komunikatif	26,20	36,70
	c. Kurang Komunikatif	85,80	77,50
6.	Eksistensi pendamping		
	a. Sangat diperlukan	61,20	51,20
	b. Diperlukan	24,60	25,40
	c. Kurang diperlukan	1,70	0,80

Pendamping dalam kegiatan Demapan ini perannya sangat penting karena sangat dibutuhkan oleh masyarakat desa sekaligus berfungsi sebagai pengarah di lapang. Kompetensi dari pendamping juga mewarnai kegiatan, umumnya karena kompetensi pendamping adalah bidang pertanian serta dibekali tentang administrasi maka bidang tersebutlah yang dominan mewarnai kegiatan. Sedangkan bidang lain kurang tersentuh. Sebaiknya pendamping bukan hanya satu orang tetapi beberapa orang dengan kompetensi berbeda sesuai yang dibutuhkan masyarakat. Secara lengkap dinamika pendampingan program Demapan dapat dilihat pada Tabel 26.

3.6.6 Eksistensi dan Dampak Program Lintas Sektor

Eksistensi dan dampak program lintas sektoral di desa Demapan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Eksistensi Program Lintas Sektoral di Demapan Status Mandiri di Provinsi Lampung, Selama Periode Program dan 2015

No	Program Lintas Sektor	Periode Program	2015
1.	Jumlah Rumahtangga penerima program JPS terpadu berbasis Rumahtangga (orang)		
	a. Raskin	182	125
	c. BLT/Kartu Indonesia Pintar/Kartu Keluarga Sejahtera/	167	142
	c. Jamkesmas/BPJS/	127	141
2.	Program pemberdayaan PNPM		
	a. PNPM Sektor Pertanian <ul style="list-style-type: none"> ● Jumlah (buah) 	33	35

	● Jenis (sebutkan) ¹⁾		
	● Jumlah rumatangga penerima (orang)		
	b. PNPM Sektor Non Pertanian	48	53
	● Jumlah (buah)		
	● Jenis (sebutkan) ¹⁾		
	● Jumlah rumatangga penerima (orang)		
3.	Program pemberdayaan UKM		
	a. UKM Sektor Pertanian	6	9
	● Jumlah (buah)		
	● Jenis (sebutkan) ¹⁾		
	● Jumlah rumatangga penerima (orang)		
	b. UKM Sektor Non Pertanian	5	7
	● Jumlah (buah)		
	● Jenis (sebutkan) ¹⁾		
	● Jumlah rumatangga penerima (orang)		

¹⁾ Narasikan didalam teks (kinerja permasalahan dan perspektifnya)

Program-program lintas sector yang berada di desa demapan status mandiri di Propinsi Lampung tampak pada eksistensi beberapa program seperti program pemberdayaan PNPM, program pengembangan UKM serta program JPS terpadu. Dibandingkan pada periode sebelum program, dengan setelah program pada tahun 2015, jumlah rumah tangga penerima Raskin dan BLT mengalami penurunan, sebaliknya pada jamkesmas mengalami sedikit peningkatan. Hal tersebut dimungkinkan mengingat jumlah RT penerima program tersebut tidak sama pada periode yang berbeda. Perbedaan inipun terkait dengan adanya perbedaan konsep RT miskin yang diaplikasikan pada setiap program yang berbeda.

Eksistensi program PNPM dan UKM pada umumnya hanya berkisar pada sector non pertanian yang bersifat fisik khususnya untuk program PNPM. Program yang dirasakan keberadaannya oleh rumah tangga penerima program antara lain adalah pembuatan jalan, irigasi, pembuatan sumur bor, gorong-gorong, Puskesmas sedangkan program yang terkait dengan sector pertanian di desa antara lain adalah irigasi dan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP).

Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumah Tangga terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung tahun 2015 digambarkan secara rinci pada Tabel 28. JPS terpadu di desa demapan sedikit banyak memberikan dampak pada kinerja Demapan yang diungkapkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang tergabung dalam Tim Pangan Desa (TPD), Lembaga Keuangan Desa (LKD) serta pamong desa. Lebih dari 50 peserta mengungkapkan bahwa pengaruh ini tampak pada kinerja usaha penduduk miskin, mempercepat keluar dari perangkap kemiskinan, peningkatan akses ekonomi, peningkatan kapasitas SDM penduduk miskin serta peningkatan kinerja ekonomi RT.

Pengaruh dari program lain terhadap kinerja Demapan di Propinsi Lampung adalah program pemberdayaan PNPM Mandiri (Tabel 29). Dampak terbesar yang dirasakan menurut pendapat para tokoh masyarakat adalah dalam peningkatan kapasitas produksi dan ekonomi KA, mempercepat pengentasan rawan pangan serta memantapkan pencapaian ketahanan pangan di wilayah KA. Dampak terkecil dari Program Pemberdayaan PNPM Mandiri terhadap kinerja demapan di Propinsi Lampung adalah kinerja kelembagaan demapan.

Tabel 28. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumahtangga terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung, 2015

No	Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumahtangga	Proposi Peserta FGD dengan jawaban S (%) (2015)
1.	Meningkatkan kapasitas SDM penduduk miskin	54,27
2.	Meningkatkan kinerja usaha penduduk miskin	60,37
3.	Meningkatkan akses ekonomi (usaha dan kesempatan kerja) penduduk miskin;	58,54
4.	Mempercepat keluar dari perangkap kemiskinan	60,37
5.	Meningkatkan kinerja ekonomi RT dan kelompok	51,83

Tabel 29. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak Program Pemberdayaan PNPM Mandiri Terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung, 2015

No	Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumahtangga	Proposi Peserta FGD dengan jawaban Setuju (%) (2015)
1.	Meningkatkan kinerja kelembagaan Demapan	41.76
2.	Meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi KA	62.15
3.	Memantapkan pencapaian ketahanan pangan ditingkat wilayah KA	55.23
4.	Meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi desa	55.02
5.	Mampu mengsinergikan dan mengintegrasikan ekonomi KA dan ekonomi desa	49.53
6.	Mempercepat pengentasan rawan pangan dan kemiskinan di tingkat KA dan desa	54.79

Program Pemberdayaan UKM terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung 2015 (Tabel 30) dirasakan masyarakat masih kurang optimal karena memang masih sangat minim jumlahnya. Oleh karena itu ke depan program pemberdayaan UKM perlu ditingkatkan terutama untuk KWT RT miskin sehingga bisa menambah pendapatan bagi ibu-ibu RT miskin.

Sedangkan dampak langsung program Demapan dibandingkan program lainnya terhadap pengentasan rawan pangan di tingkat Demapan dapat dilihat pada Tabel 32. Berdasarkan kontribusi terhadap rawan pangan maka sama dengan dampak terhadap pencapaian ketahanan pangan, maka program Demapan menempati urutan pertama, disusul PNPM Non Pertanian, program UKM Sektor pertanian, PNPM Sektor pertanian dan terakhir adalah program UKM non pertanian.

Tabel 30. Proporsi Peserta FGD yang Menyatakan Persetujuannya (S) terhadap Dampak Program Pemberdayaan UKM terhadap Kinerja Demapan di Provinsi Lampung, 2015

No	Dampak JPS Terpadu Berbasis Rumahtangga	Proporsi Peserta FGD dengan jawaban Setuju (%) (2015)
1.	Meningkatkan kapasitas produksi dan ekonomi KA	44.66
2.	Meningkatkan kapasitas produksi dan pertumbuhan ekonomi desa	38.10
3.	Mampu mengsinergikan dan mengintegrasikan ekonomi KA dan ekonomi desa	37.88
4.	Mampu mensinergikan dan mengintegrasikan ekonomi desa dan ekonomi perkotaan	31.14
5.	Memantapkan pencapaian ketahanan pangan, pengentasan rawan pangan/kemiskinan di pedesaan	39.74

Dampak langsung program Demapan disbanding program lainnya terhadap pencapaian ketahanan pangan dapat dilihat pada Tabel 31. Berdasarkan urutan besarnya dampak langsung, program Demapan menempati urutan pertama dalam pencapaian ketahanan pangan disusul PNPM Non Pertanian, Program UKM Sektor Pertanian, PNPM Sektor pertanian dan program UKM Non Pertanian. Sesuai dengan sasaran program Demapan, memang program ini mempunyai kontribusi 42. Sedangkan dampak langsung program Demapan dibandingkan program lainnya terhadap pengentasan rawan pangan di tingkat Demapan dapat dilihat pada Tabel 32.

Tabel 31. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pencapaian Ketahanan Pangan di Tingkat Demapan

No	Nama Program	Urutan besarnya dampak langsung	Kontribusi (%) ²⁾
1	Program Demapan	1	42.31
2	PNPM Sektor Pertanian	4	7.69
3	PNPM Non Pertanian	2	26.92
4	Program UKM Sektor Pertanian	3	19.23
5	Program UKM Non Pertanian	5	3.85
Total			100

Berdasarkan kontribusi terhadap rawan pangan maka sama dengan dampak terhadap pencapaian ketahanan pangan, maka program Demapan menempati urutan pertama, disusul PNPM Non Pertanian, program UKM Sektor pertanian, PNPM Sektor pertanian dan terakhir adalah program UKM non pertanian.

Tabel 32. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pengentasan Rawan Pangan di Tingkat Demapan

No	Nama Program	Urutan besarnya dampak langsung	Kontribusi (%) ²⁾
1	Program Demapan	1	0,00
2	PNPM Sektor Pertanian	4	52,71
3	PNPM Non Pertanian	2	21,74
4	Program UKM Sektor Pertanian	3	13,04
5	Program UKM Non Pertanian	5	4,35
Total			100

Dampak langsung program Demapan dibandingkan program lainnya terhadap pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 33. Berdasarkan besarnya kontribusi program terhadap pengentasan kemiskinan, program Demapan menempati urutan pertama disusul PNPM sector pertanian, program UKM sector

pertanian, PNPM Non Pertanian dan terakhir adalah program UKM Non Pertanian. Dengan demikian program Demapan mempunyai kontribusi terbesar terhadap pengentasan kemiskinan atau sudah sesuai sasaran walaupun diperlukan juga program lainnya yang sinergis.

Tabel 33. Perbandingan Dampak Langsung Program Demapan dan Program Lainnya terhadap Pngentasan Kemiskinan di Tingkat Demapan

No	Nama Program	Urutan besarnya dampak langsung	Kontribusi (%) ²⁾
1	Program Demapan	1	33,33
2	PNPM Sektor Pertanian	4	28,57
3	PNPM Non Pertanian	2	14,29
4	Program UKM Sektor Pertanian	3	19,05
5	Program UKM Non Pertanian	5	4,76
Total			100

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal berikut

- (1) Program Demapan yang telah dilakukan memiliki dampak: (a) sedikit meningkatkan usaha produktif namun keberlangsungan usaha masih harus ditingkatkan , (b) sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil meningkatkan akses dan posisi tawar rumah tangga anggota KA , (c) meningkatkan kelembagaan khususnya KA dan LKD namun masih kurang untuk TPD, (d) sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan, (e) menurunkan tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga anggota KA kategori miskin dan meningkatnya proporsi rumah tangga KA kategori kurang sejahtera dan sejahtera , (f) menurunkan kerawanan pangan pada rumah tangga anggota KA belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program, (g) meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota KA, terlihat

pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan pangan, (h) meningkatkan pola pikir pada beberapa aspek kehidupan masyarakat khususnya kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidikan bagi anak-anak/keluarga dan eksistensi pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam pelaksanaan Program Demapan.

- (2) Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota KA relatif lebih baik daripada bukan anggota KA. Perbandingan proporsi rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA berturut-turut untuk kategori tidak tahan pangan 50,4 persen dan 64,2 persen; kurang tahan pangan 27,9 persen dan 32,9, serta tahan pangan 6,7 persen dan 2,9 persen.
- (3) Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

4.2 Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan juga pendalaman kondisi nyata di lapang maka ada beberapa saran:

- (1) Usaha produktif anggota KA belum berkembang serta keberlanjutannya perlu ditingkatkan. Untuk itu tenaga pendamping perlu lebih intensif dalam melaksanakan pendampingan.
- (2) Posisi tawar anggota KA belum berhasil ditingkatkan karena mereka masih memasarkan produksinya secara individu. Oleh karena itu fungsi kelompok dalam pemasaran hasil harus ditingkatkan.
- (3) Kinerja TPD dalam pelaksanaan program belum optimal, oleh karena itu perlu upaya perbaikannya. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok dan perlunya dilakukan monitoring program dari Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota.
- (4) Mengingat sumber air merupakan faktor kendala dalam pengembangan potensi wilayah untuk produksi pangan maka perlu dukungan teknologi penyediaan air di desa-desa rawan pangan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dapat disimpulkan hal-hal berikut

- (4) Program Demapan yang telah dilakukan memiliki dampak: (a) sedikit meningkatkan usaha produktif namun keberlangsungan usaha masih harus ditingkatkan, (b) sedikit meningkatkan ketersediaan pangan, namun belum berhasil meningkatkan akses dan posisi tawar rumah tangga anggota KA, (c) meningkatkan kelembagaan khususnya KA dan LKD namun masih kurang untuk TPD, (d) sedikit meningkatkan daya beli yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga miskin yang tidak dapat menjangkau pangan, (e) menurunkan tingkat kemiskinan yang ditandai dengan menurunnya proporsi rumah tangga anggota KA kategori miskin dan meningkatnya proporsi rumah tangga KA kategori kurang sejahtera dan sejahtera, (f) menurunkan kerawanan pangan pada rumah tangga anggota KA belum terlihat, diduga adanya pengaruh berbagai faktor di luar program, (g) meningkatkan ketahanan pangan pada rumah tangga anggota KA, terlihat pada penurunan proporsi rumah tangga yang kurang tahan pangan, (h) meningkatkan pola pikir pada beberapa aspek kehidupan masyarakat khususnya kesadaran akan manfaat dan aktualisasi pendidikan bagi anak-anak/keluarga dan eksistensi pemahaman dan aktualisasi kegiatan berkelompok serta pemahaman akan pentingnya pendamping dalam pelaksanaan Program Demapan.
- (5) Tingkat ketahanan pangan rumah tangga anggota KA relatif lebih baik daripada bukan anggota KA. Perbandingan proporsi rumah tangga anggota KA dan bukan anggota KA berturut-turut untuk kategori tidak tahan pangan 50,4 persen dan 64,2 persen; kurang tahan pangan 27,9 persen dan 32,9, serta tahan pangan 6,7 persen dan 2,9 persen.
- (6) Potensi luas wilayah yang besar kurang dapat dimanfaatkan untuk mendukung swasembada pangan karena kurangnya sumberdaya air.

4.2 Saran

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan dan juga pendalaman kondisi nyata di lapang maka ada beberapa saran:

- (5) Usaha produktif anggota KA belum berkembang serta keberlanjutannya perlu ditingkatkan. Untuk itu tenaga pendamping perlu lebih intensif dalam melaksanakan pendampingan.

- (6) Posisi tawar anggota KA belum berhasil ditingkatkan karena mereka masih memasarkan produksinya secara individu. Oleh karena itu fungsi kelompok dalam pemasaran hasil harus ditingkatkan.
- (7) Kinerja TPD dalam pelaksanaan program belum optimal, oleh karena itu perlu upaya perbaikannya. Perbaikan dapat dilakukan dengan meningkatkan frekuensi pertemuan kelompok dan perlunya dilakukan monitoring program dari Badan Ketahanan Pangan kabupaten/kota.
- (8) Mengingat sumber air merupakan faktor kendala dalam pengembangan potensi wilayah untuk produksi pangan maka perlu dukungan teknologi penyediaan air di desa-desa rawan pangan.

